

**TINJAUAN TERHADAP PROSEDUR PELAKSANAAN
KLIRING NASIONAL DALAM MEMPELANCAR SISTEM
PEMBAYAYARAN PADA BANK INDONESIA
DI SAMARINDA**

OLEH :

ESTIRATNAWATI

NIM : 03110025

NPM : 03.11.311.401100.11186

*Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
Ekonomi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda*

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH

SAMARINDA

2007



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 2547/D/T/2005 DAN 2548/D/T/2005
Kampus : Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Telp. 743459 - 7070289 Samarinda

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Tahun 2007 Sarjana Ekonomi Muhammadiyah Samarinda, setelah melaksanakan ujian pada hari *Sabtu* tanggal *Dua puluh lima* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Tujuh* bertempat di kampus STIE Muhammadiyah Samarinda :

- Dengan Mengingat :
1. Surat Keputusan Dirjen Dikti No.02/Dikti/Kep/1991 tanggal 29 Januari 1991;
 2. Surat Keputusan Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda Nomor : 12/11.3.AU/A/2007;
 3. Buku Pedoman Pendidikan STIE Muhammadiyah Samarinda tahun 1991.

MEMPERHATIKAN

1. Jawaban dan Sanggahan yang diberikan selama ujian berlangsung ;
2. Hasil Ujian yang dicapai dalam skripsi dengan Susunan Anggota Panitia Penguji ;

NO	N A M A	TANDA TANGAN
1	Drs.H. ARIFIN IDRIS, M.Si.	1.
2	H. M. HERMANTO, SE, MM.	2.
3	H. SYAMSUL ARIFIN, SE, MM.	3.
4	Drs.H.M. ARIFIN HADI, MM.	4.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

N A M A : ESTI RATNAWATI
 N I M : 03110025
 N P M : 03.11.311.401101.00186
 JURUSAN/PS : MANAJEMEN
 JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TERHADAP PROSDUR PELAKSANAAN KLIRING NASIONAL DALAM MEMPERLANCAR SISTEM PEMBAYARAN PADA BANK INDONESIA DI SAMARINDA.

DENGAN NILAI :
DINYATAKAN : **LULUS / TIDAK LULUS**

Samarinda, 25 AGUSTUS 2007

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua,

H. Syamsul Arifin, SE, MM
 KTAM: 929 121



Sekretaris,

Misransyah, SE
 KTAM: 568 975



HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kurang Nasional dalam Mempelancar Sistem Pembayaran pada Bank Indonesia

Nama Mahasiswa : Ecki Patrawati

NIM & NPM : 03110025 & 03.11.401100.00186

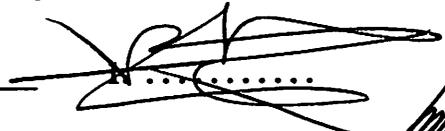
Jurusan / PS : Managemen

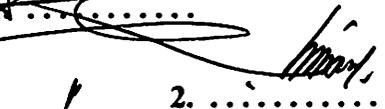
Telah Diuji dan Disyahkan

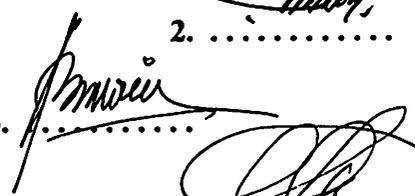
Pada Hari / Tanggal : Sabtu, 25 Agustus 2007

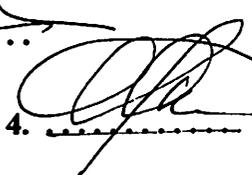
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA

Menyetujui :

Penguji I : Drc. H. Arifin Loric, M.Si 

Penguji II : H.M. Hermanto, SE, MM 2. 

Penguji III : H. Syamsul Arifin, SE, MM 3. 

Penguji IV : Drc. H. M. Arifin Hadi, MM 4. 

Mengetahui:



Ketua Jurusan Manajemen dan Ekonomi Pembangunan
STIE Muhammadiyah Samarinda


MISRANSYAH, SE
KTAM. 568975

RINGKASAN

ESTI RATNAWATI, "Tinjauan terhadap prosedur pelaksanaan kliring nasional dalam mempelancar sistem pembayaran pada Bank Indonesia di Samarinda".

Dibawah bimbingan Bapak Drs. H. Arifin Idris, MSi dan H.M.Hermanto,SE,MM.

Dengan semakin berkembangnya dalam bidang perekonomian dan Perbankan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Ini ditandai antara lain oleh tingginya transaksi Perdagangan dan Transaksi Keuangan, baik yang bersifat lokal,Regional, maupun Internasional.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Sistem Pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan, dan perbankan suatu negara. Keberadaan suatu sistem pembayaran tersebut diharapkan, dapat mempermudah akses pelaku ekonomi terhadap berbagai keperluan pembayaran dan sekaligus diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif serta terciptanya Sistem Perbankan yang sehat.

Untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh perusahaan, maka terlebih dahulu diketahui keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan. Sebaliknya risiko ketidaktancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak Nikmat dan Rahmat – Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari pihak, karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs.H.Suyatman Spd.MM Selaku Ketua STIE Muhammadiyah Samarinda.
2. Bapak Drs.H.Arifin Idris, Msi. Selaku Dosen pembimbing 1 yang penuh kesabaran membimbing dan memberikan arahan kepadapenulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H.M.Hermanto, SE, MM Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Pemimpin Bank Indonesia Samarinda.
5. Seluruh Staf Kantor Bank Indonesia Samarinda, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayah dan Bunda tercinta yang penuh kasih sayang telah mendoakan serta dengan sabar terus mensupprt dan memberikan banyak pengorbanan. Dan kepada Kakak dan adik tercinta terimakasih atas dukungan dan do'anya.

7. Teman – teman manajemen angkatan 2003 yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis.
8. Orang terdekat aku Sugianto yang penuh kasih sayang sayang dan tulus memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.
9. Sahabatku Nor maya, Rahma terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan dukungan serta kerjasama yang telah diberikan menjadi amal ibadah bagi kita dan mendapat Ridho Allah SWT, Amien.

Akhirnya penulis dapat menyadari sepenuhnya, penulis ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, kritik dan saran yang akan memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi mereka yang memerlukan.

Samarinda, 20 Agustus 2007

Penulis,

ESTIRATNAWATI

RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : ESTI RATNAWATY
2. Tempat ,Tanggal Lahir : SAMARINDA, 12MARET 1984
3. Agama : ISLAM
4. Anak ke : 2 (DUA)
5. Pekerjaan : MAHASISWI
6. Alamat : JL.REVOLUSI KARANG REJO RT 7
NO.39 LOK BAHU SAMARINDA

B. DATA PENDIDIKAN

1. SDN 041 Tamatan Tahun 1997 Di Samarinda
2. SLTP Muhammadiyah 2 Tamatan Tahun 2000 Di Samarinda
3. SMU KESATUAN 1 Tamatan Tahun 2003 Di Samarinda

C. DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : Mardji Susanto
2. Nama Ibu : Sutarti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RIWAYAT HIDUP.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	77
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pembelajaran.....	6
1. Pengertian dan Sistem dan Prosedur.....	6
2. Sistem Pembayaran.....	6
3. Komponen dan Elemen Sistem Pembayaran.....	9
4. Pengertian Kliring.....	22
5. Pengertian SKNBI.....	49
B. Hipotesis.....	49
C. Definisi Konseptual.....	49

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional.....	51
B. Perincian Data Yang di Perlukan.....	52
C. Jangkauan Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Indonesia Samarinda.....	54
B. Visi Misi Bank Indonesia Samarinda.....	56
C. Struktur Organisasi Bank Indonesia Samarinda.....	57

BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis.....	61
B. Pembahasan.....	67

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

REFERENSI.....	76
-----------------------	-----------

LAMPIRAN.....	77
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 :.....	78
Tabel 2 :.....	79
Tabel 3 :.....	80
Tabel 4 :.....	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Gambar Kliring Kredit.....	42
Gambar 2 : Gambar Kliring Debet.....	44
Gambar 3 : Gambar Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia Samarinda.....	58
Gambar 4 : Gambar Flowchart Sistem Kliring manual.....	61
Gambar 5 : Gambar Penyelenggara Kliring Bank Indonesia.....	62
Gambar 6 : Gambar Flowchart Sistem Kliring Semiotomasi.....	64
Gambar 7 : Gambar Penyelenggara Kliring Bank Indonesia.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dalam bidang perekonomian dan perbankan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Ini ditandai antara lain oleh tingginya transaksi perdagangan dan transaksi keuangan, baik yang bersifat lokal, regional, maupun internasional. Dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia dewasa ini, membuat keberadaan sistem pembayaran yang menjamin aliran dana secara efisien, dan handal menjadi semakin penting.

Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Keberadaan suatu sistem pembayaran tersebut diharapkan dapat mempermudah akses pelaku ekonomi terhadap berbagai keperluan pembayaran dan sekaligus diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang efektif serta terciptanya sistem perbankan yang sehat. Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya resiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan.

Sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga dan pada umumnya dilakukan oleh bank sentral. Bank Sentral

memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian suatu negara. Bank Sentral juga mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masyarakat pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini salah satunya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dengan demikian sistem pembayaran yang aman dan lancar merupakan salah satu persyaratan bagi pencapaian kestabilan nilai rupiah.

Bank Indonesia pada umumnya terlibat dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, terutama sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, penyelenggaraan serta pengawas pembayaran tunai yang terdiri dari uang kertas dan uang logam, pengatur dan pelaksana operasional kliring diseluruh Indonesia, serta bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengaturan atas penyelesaian transaksi (setelmen) dalam rangka mengontrol risiko kredit maupun risiko bersifat sistemik.

Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang dan fungsinya untuk penyelesaian transaksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan sistem pembayaran diawali dari pembayaran secara tunai samapai kepada pembayaran elektronis yang bersifat non tunai. Mayoritas

masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran barang dan jasa sehari-hari, bahkan untuk transaksi bernilai tinggi khususnya di kota kecil atau wilayah yang jauh dari kota besar. Penggunaan cek dan bilyet giro umumnya terbatas untuk perusahaan atau anggota masyarakat dari golongan ekonomi kuat.

Tetapi seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya teknologi membuat sistem pembayaran non tunai semakin penting. Sistem pembayaran non tunai dilakukan melalui proses kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun bank atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Sebenarnya para pihak yang bertransaksi dapat melakukan hubungan bilateral tanpa melalui proses kliring, tetapi pada tingkat tertentu apabila jumlah pihak yang bertransaksi pembayaran bertambah banyak maka hubungan bilateral pun menjadi tidak efisien lagi. Sehingga proses kliring menjadi suatu transaksi yang sangat penting dalam mempermudah dan memperlancar sistem pembayaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana prosedur pelaksanaan kliring nasional dalam memperlancar sistem pembayaran pada Bank Indonesia Samarinda?”

C Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Samarinda.
2. Untuk mengetahui peranan sistem pembayaran dalam perekonomian.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat sejumlah manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pemimpin ataupun karyawan Bank Indonesia Samarinda dalam mempelancar sistem pembayaran.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.
3. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan, baik pihak intern maupun pihak ekstern dalam rangka penggunaan sistem pembayaran yang tepat.
4. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi atau materi dari penulisan ini, maka disusun sistematika penulisa sebagai berikut :

- BAB I, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.**
- BAB II, Tinjauan Pustaka yang terdiri dari pengertian pembelajaran yang meliputi Pengertian sistem dan prosedur, Sistem Pembayaran, Instrumen Sistem Pembayaran, Pengertian Kliring, Pengertian SKNBI dan Ketentuan Undang-undang Perbankan Mengenai SKNBI, Hipotesis dan Definisi Konsepsional**
- BAB III Metode penelitian yang terdiri dari definisi operasional, perincian data yang diperlukan, jangkauan penelitian, teknik pengumpula data, serta alat analisis dan pengujian hipotesis.**
- BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari Sejarah singkat Bank Indonesia, struktur organisasi Bank Indonesia, Visi dan Misi Bank Indonesia Samarinda, BankPeserta Kliring Wilayah KBI Samarinda, Proses kegiatan SKNBI, dan Kendala dan Solusi SKNBI.**
- BAB V. Analisis dan Pembahasan**
- BAB VI. Kesimpulan dan Saran yang memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan serta saran – saran yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan.**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembelajaran

1. Pengertian Sistem dan Prosedur

Pengertian sistem menurut Mulyadi dalam bukunya "Sistem Akutansi adalah sebagai berikut:

"Sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu."

Menurut Ibnu Syamsi dalam bukunya "Sistem dan Prosedur Kerja" sistem didefinisikan sebagai berikut :

"Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan suatu fungsi."

Pengertian lain sistem dikemukakan oleh Kast yang dikutip oleh Ibnu Syamsi adalah sebagai berikut :

"Sistem adalah suatu penggabungan, pernyataan dari dua atau lebih bagian-bagian, komponen-komponen, atau subsistem-subsistem yang interdependen, dan ditandai oleh batas-batas yang jelas dari lingkungan supra sistemnya."

Menurut Narko "Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen yang berusaha mencapai tujuan tertentu."

Dari pengertian sistem diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu unsur atau komponen yang saling berhubungan satu dengan yang

lainnya terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil untuk menjadi suatu sistem yang lebih besar yang bekerja bersama-sama sehingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Menurut Ibnu Syamsi pengertian prosedur adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur merupakan suatu rangkaian ketentuan – ketentuan mengenai urutan kegiatan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.

Sedangkan menurut Mulyadi prosedur didefinisikan sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Pengertian lain prosedur yang dikemukakan oleh Narko dalam bukunya “Sistem Akutansi” adalah sebagai berikut :

“Prosedur merupakan urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan berulang-ulang.”

Berdasarkan pengertian diatas prosedur dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang untuk menangani transaksi perusahaan yang juga terjadi berulang kali.

2. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin berkembang. Penggunaan instrumen pembayaran oleh masyarakat tergantung kepada banyak faktor yaitu tingkat ekonomi, budaya dan preferensinya.

Perry Warjiwo memberikan pengertian sistem pembayaran sebagai berikut :

“Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan intruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antarperorangan, bank, atau lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara.”

Berdasarkan definisi diatas sistem pembayaran adalah sistem yang digunakan untuk penyelesaian transaksi pembayaran baik antarperorangan, antarbank, maupun lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara.

Prinsip dasar sistem pembayaran yang dikemukakan oleh Perry Warjiwo meliputi 10 kriteria antara lain :

1. Sistem ini harus memiliki landasan yang kuat;
2. Sistem ini harus mempunyai aturan dan prosedur yang memungkinkan peserta memahami risiko keuangan yang mungkin akan dihadapi;

3. Sistem ini harus memiliki prosedur yang jelas untuk manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas;
4. Sistem ini harus menjamin agar setelmen yang dilakukan pada hari yang sama, minimal pada akhir kali;
5. Untuk sistem yang memiliki multilateral netting, sistem ini minimal harus mampu memastikan penyelesaian setelmen harian yang cepat pada saat peserta tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk satu setelmen terbesar;
6. Aset yang digunakan untuk setelmen sebaiknya berada di bank sentral;
7. Sistem ini harus menjamin tingkat keamanan dan kepercayaan operasional yang tinggi dan harus memiliki penanganan darurat untuk penyelesaian pemrosesan harian yang cepat;
8. Sistem ini harus menyediakan alat untuk melakukan pembayaran yang praktis untuk pemakaiannya dan efisien untuk perekonomian;
9. Sistem ini harus memiliki tujuan dan kriteria yang transparan untuk peserta, yang memungkinkan akses yang adil dan transparan;
10. Pengaturan dari sistem ini harus efektif, akuntabel, dan transparan.

Prinsip dasar sistem pembayaran tersebut dimaksudkan sebagai pedoman umum untuk pelaksanaan sistem pembayaran yang lebih aman dan efisien.

3. Komponen dan Elemen Sistem Pembayaran

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran diperlukan adanya komponen sistem pembayaran yang memadai antara lain :

1. Institusi atau lembaga yang menyediakan jasa pembayaran;
2. Instrumen yang digunakan dalam sistem pembayaran yang mengatur hak dan kewajiban keuangan peserta pembayaran;
3. Kerangka hukum yang mengatur ruang lingkup hukum dan instrumen sistem pembayaran , hak dan kewajiban peserta, sanksi, dan aturan lainnya untuk menjamin terlaksananya sistem pembayaran secara hukum;
4. Kerangka kebijakan sistem pembayaran yang jelas, baik kebijakan umum maupun operasional, yang mendasari pengembangan sistem pembayaran.

Menurut Sheppard yang dikutip oleh Perry Warjiwo, menyatakan apapun bentuk sistem pembayaran pada umumnya memiliki tiga elemen utama yaitu;

1. Otorisasi pelaksanaan pembayaran, yaitu pembayar memberikan otorisasi kepada bank untuk mentransfer dana;
2. Pertukaran perintah pembayaran antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Proses ini biasanya disebut kliring.
3. Setelmen antar bank yang terlibat dalam proses transaksi pembayaran. Bank pembayar harus membayar bank penerima, baik bilateral maupun melalui rekening yang dimiliki bank-bank tersebut pada lembaga penyelenggara kliring, yang umumnya adalah bank sentral.

2.1. Sistem Pembayaran Tunai

Sistem Pembayaran Tunai menurut Perry Warjiwo adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan

Undang – Undang yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan dibidang pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari sisi nominal maupun pecahannya. Uang kertas rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 dan 100.000 sedangkan uang logam rupiah dalam peredaran terdiri dari denominasi 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, dan 1.000.

2.2. Sistem Pembayaran Non Tunai

Sistem Pembayaran Non Tunai menurut Perry Warjiwo adalah instrumen pembayaran non tunai di sediakan , terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit serta instrumen yang berbasis tukar warkat, seperti kartu ATM, kartu debit dan kartu kredit. Penggunaan alat pembayaran non tunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dan menciptakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

A. Sistem pembayaran non tunai menurut Perry Warjiwo yang berbasis warkat adalah :

- a. Cek : Surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- b. Bilyet Giro : Surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindah bukukan (tidak berlaku untuk penarikan tunai) sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- c. Nota Debet : Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.
- d. Nota Kredit : Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada lain untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.
- e. Wesel Bank untuk Transfer : Wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
- f. Surat bukti penerimaan transfer : Surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

B. Pemindahan Dana

C. Pendekatan secara langsung

D. Instrumen berbasis kartu

1. Kartu kredit
 2. Kartu ATM
 3. Kartu debet
- E. Instrumen melalui kantor pos
- F. Instrumen Berbasis internet/telepon

3. Instrumen Sistem Pembayaran

Penggunaan instrumen pembayaran dewasa ini telah berkembang dengan cepat, ini disebabkan karena meningkatnya volume dan nilai transaksi serta pesatnya perkembangan teknologi.

Menurut Perry Warjiwo instrumen pembayaran terdiri dari :

a. Instrumen pembayaran tunai;

Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu Rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas.

b. Instrumen Pembayaran Non Tunai terdiri dari :

b.1 Instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit, wesel Bank untuk transfer, dan surat bukti untuk penerimaan.

b.2 Pemindahan dana, dapat dilakukan melalui : Transfer elektronik antarbank, sistem kliring berbasis warkat untuk transaksi lokal, jaringan bank koresponden bagi pemindahan dana lintas wilayah, dan

sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) baik untuk pemindahbukuan dana lokal maupun lintas wilayah.

- b.3 Pendebitan secara langsung
- b.4 Instrumen berbasis kartu, seperti : kartu kredit , kartu ATM, dan kartu debit
- b.5 Instrumen melalui kantor pos, seperti: giro dan pos wesel baik dalam negeri maupun luar negeri, cek pos dan Postal Traveler's Cheques.
- b.6 Instrumen berbasis internet atau telepon.

Menurut Sheppard yang dikutip oleh Perry Warjiwo, instrumen dalam sistem pembayaran mempunyai tiga karakteristik utama yaitu :

- Bentuk fisik
 - Sistem pengaman
 - Basis pembayaran
1. Secara fisik instrumen dalam sistem pembayaran dapat berupa ;
 - a. Warkat atau dokumen seperti cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit.
 - b. Kartu seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, smart cards.
 - c. Tanpa fisik melalui internet atau telepon
 2. Sistem pengaman ini di tunjukan untuk memverifikasi bahwa intruksi diberikan oleh yang berhak/pemilik rekening, dan bukan merupakan pemalsuan. Untuk uang tunai, sistem pengamannya dapat berupa tanda air, benang pengaman, cetak intaglio, cetak tersembunyi, dan rectoverso. Untuk

instrumen berbentuk warkat sistem pengamannya dapat berbentuk nomor seri dan tanda tangan pemilik rekening. Untuk instrumen berbentuk kartu, sistem pengamannya berbentuk personal identification Number (PIN). Sedangkan untuk instrumen tanpa fisik melalui internet atau telepon, sistem pengamannya dapat berbentuk satu atau serangkaian password (kartu kunci) atau pertanyaan yang harus dijawab oleh pemberi instruksi.

3. Instrumen pembayaran ada yang berbasis kredit dan berbasis debit. Transaksi dengan instrumen berbasis kredit memiliki struktur yang sama dengan transfer tunai langsung dari pembayar ke penerima dengan menggunakan mekanisme rekening bank. Transaksi berbasis kredit dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke bank pembayar yang selanjutnya disampaikan ke bank penerima. Transaksi ini bermanfaat apabila pembayar harus menyelesaikan pembarannya sebelum menerima barang atau jasa yang dibelinya. Sementara itu, transaksi dengan instrumen berbasis debit (seperti Cek) dimulai dengan penyampaian instruksi pembayaran dari pembayar ke penerima dana. Pembayaran dana dilakukan setelah instruksi pembayaran diserahkan penerima kepada bank pembayar dan bank pembayar telah memutuskan untuk membayar sesuai instruksi pembayaran tersebut.

A. Definisi dan Fungsi Uang

Uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Dalam perekonomian yang semakin modern seperti sekarang ini uang

memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara.

Harry Waluya dalam bukunya "Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan" mendefinisikan uang sebagai berikut :

"Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dipergunakan oleh umum sebagai alat pembantu dalam perukaran."

Frank J. Fabozzi, Franco Modigliani dan Michael G. Ferri memberikan pendapat mereka mengenai pengertian uang yaitu :

1. Uang adalah sesuatu yang berfungsi sebagai numeraire atau unit perhitungan, dengan kata lain unit yang digunakan untuk mengukur kekayaan.
2. Uang adalah setiap instrumen yang berfungsi sebagai medium pertukaran, yaitu segala hal yang secara umum diterima dalam pembayaran transaksi-transaksi barang, jasa dan modal.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum yang digunakan sebagai alat pembayaran, sebagai alat tukar, dan juga sebagai alat pengukur kekayaan.

Fungsi uang menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

1. Alat tukar menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa dengan kata lain uang dapat

digunakan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

2. Satuan hitungan, besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah, dengan adanya uang akan mempermudah keseragaman dalam satuan hitung.
3. Penimbun kekayaan, dalam menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Uang yang disimpan menjadi kekayaan dapat berupa uang atau uang yang disimpan dibank dalam bentuk rekening.
4. Standar pencicilan hutang. Dengan adanya uang akan mempermudah menentukan standar pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran. Begitu pula dengan adanya uang maka secara mudah dapat ditentukan beberapa besar nilai hutang piutang yang harus diterima atau dibayar sekarang atau dimasa yang akan datang.

Sedangkan menurut Harry Waluya fungsi uang antara lain :

1. Alat tukar menukar (Medium of Exchange), uang sebagai alat tukar menukar sangat berfungsi untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, uang paling efisien dipakai untuk transfer barang dan jasa, dan memberikan kebebasan memilih dalam hal pemilikan barang dan jasa. Prosesnya ialah, barang tukar dengan uang tanpa lebih dahulu menyamakan keinginan. Selanjutnya dengan uang tersebut dapat membeli barang lainnya.

2. Sebagai kesatuan hitung (*Unit of Account*), uang memberikan kemudahan bagi pengambilan keputusan ekonomi dalam ukuran rupiah sampai kepecahan, lebih lanjut sebagai harga, penerimaan, biaya, dan pendapatan. Sebagai satuan pengukur nilai, nilai suatu barang dapat diukur dan diperbandingkan.
3. Sebagai alat simpan (*Store of Value*), uang memberikan kemungkinan untuk menunda konsumsi (*saving*) untuk jangka waktu tertentu, artinya uang dapat dipakai dalam bentuk yang liquid (cair), walaupun uang itu dapat menjadi barang dan jasa.
4. Sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan (*Standard of Deffered Payment*), uang dapat memberikan kemudahan untuk memperluas pemberian kredit (pinjaman) tergantung dari sistem pembayaran yang akan datang. Uang sekarang ini telah memiliki berbagai fungsi, sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat pengguna uang yang semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan masyarakat luas.
5. Kriteria dan Jenis Uang
Menurut kasmir kriteria uang agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. Adanya jaminan, setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminann dan pemerintah tertentu,

maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

- b. Disukai umum, uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sebagai standar pencicilan hutang.
- c. Nilai yang stabil, nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketepatan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka sulit untuk dipercaya oleh menggunakannya.
- d. Mudah disimpan, uang harus mudah disimpan diberbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat, dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.
- e. Mudah dibawa, uang harus dibawa kemanapun, dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ketempat lain atau dari satu tangan ketangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun. Uang sebaiknya mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena itu dalam hal ini fisik uang juga jangan terlalu besar dan diusahakan seringan mungkin.
- f. Tidak mudah rusak, uang hendaknya tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi, baik robek ataupun luntur terutama kondisi fisiknya

mengingat frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ketangan lainnya demikian besar. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya, sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.

- g. Mudah dibagi, uang mudah dibagi kedalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai sampai nominal besar sekalipun. Oleh karena itu agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.
- h. Suplai harus elastis, agar perdagangan dan usaha menjadi lancar dan jumlah uang yang beredar di masyarakat haruslah mencukupi. Tersedianya uang dalam jumlah yang cukup disesuaikan dengan kondisi usaha atau kondisi perekonomian suatu wilayah. Apabila dalam dunia usaha terjadi kekurangan uang maka berakibat kurang baik demikian pula sebaliknya apabila jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat dapat diatasi, sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang .

Jenis – jenis uang yang dikemukakan oleh kasmir adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan bahan

- a. Uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam, baik dari aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak atau

perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dengan nominal yang kecil.

- b. Uang kertas merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Uang dari bahan kertas biasanya dalam nominal yang besar sehingga mudah dibawa untuk keperluan sehari-hari.

2. Berdasarkan nilai

- a. Bernilai penuh (*full bodied money*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya.
- b. Tidak bernilai penuh (*Representatif full bodied maney*), merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya.

3. Berdasarkan lembaga

- a. Uang kartal merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral baik uang logam maupun uang kertas.
- b. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bilyet giro, traveller cheque, dan credit card.

4. Berdasarkan kawasan

- a. Uang lokal, merupakan uang yang berlaku disuatu negara tertentu.
- b. Uang regional, merupakan uang berlaku antarnegara seperti US Dollar dan menjadi standar pembayaran internasional.

4. Pengertian Kliring

Pengertian kliring menurut Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 yang dikutip oleh Perry Warjiwo adalah sebagai berikut :

“Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank (DKE), baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Menurut Kasmir “Kliring” adalah merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antarbank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan dilembaga kliring.

Definisi lebih lanjut dikemukakan oleh Harry Waluya sebagai berikut :

“Kliring terjadi pada saat dua bank komersial masing-masing menetapkan sejumlah pemilikan yang dipertukarkan melalui cek bukan dengan mata uang.”

N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswandi memberikan pendapat mereka mengenai definisi kliring adalah sebagai berikut :

“Kliring adalah suatu tata cara perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari satu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.”

Pengertian lain dari kliring adalah sebagai berikut :

“Kliring ialah sarana perhitungan warkat antarbank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kliring merupakan transaksi pertukaran warkat antarbank untuk mempermudah perhitungan dan penyelesaian kewajiban atau tagihan pembayaran antar mereka.

Menurut Perry Warjiyo tujuan utama dilaksanakan kliring adalah :

1. Untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral antarbank diseluruh Indonesia;
2. Untuk melaksanakan perhitungan penyelesaian hutang piutang yang lebih mudah, aman dan efisien;
3. Untuk menjadi salah satu bentuk pelayanan sistem pembayaran bank kepada nasabah masing-masing.

Sedangkan menurut Kasmir tujuan dilaksanakan kliring oleh Bank Indonesia adalah :

1. Untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral;
2. Agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman dan efisien.

4.1 Penyelenggara dan Peserta Kliring

A. Penyelenggara

Berdasarkan pasal 17 UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggara kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia

atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa Penyelenggara di wilayah kliring yang terdapat di kantor Bank Indonesia adalah bank Indonesia. Sedangkan penyelenggara di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan hukum baik Bank maupun bukan bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kliring sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya memberi kesempatan kepada bank untuk mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia.

1. Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Kliring

Seluruh kantor bank Indonesia merupakan penyelenggara kliring. Sistem penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan kliring dan atau penyelesaian akhir dari peserta tertentu, apabila diperoleh informasi bahwa transaksi yang diperhitungkan dalam kliring melanggar ketentuan yang berlaku dan akan memberitahukan perihal pembatalan tersebut kepada bank yang bersangkutan. Bank Indonesia berwenang pula untuk memberikan keputusan terakhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2 (dua) atau lebih peserta kliring mengenai dapat

tidaknya suatu warkat atau DKE diperhitungkan dalam kliring lokal.

2. Pihak Lain Sebagai Penyelenggara Kliring (Bank)

Penyelenggara kliring dapat dilakukan oleh pihak lain selain Bank Indonesia. Penyelenggara kliring oleh selain Bank Indonesia antara lain karena di suatu wilayah tidak terdapat kantor Bank Indonesia sehingga kantor-kantor bank yang ada di wilayah tersebut dapat mengikuti kegiatan kliring di Kantor Bank Indonesia terdekat.

B. Persyaratan Penyelenggara kliring Lokal

1. Penyelenggara kliring disuatu wilayah harus didukung oleh adanya kebutuhan penyelenggara kliring di wilayah tersebut. Untuk itu harus ada kesepakatan dari kantor-kantor bank di wilayah yang bersangkutan terlebih dahulu secara tertulis mengenai pentingnya penyelenggara kliring di wilayah tersebut dan kesepakatan mengenai kantor Bank yang diusulkan menjadi penyelenggara.
2. Mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan ditempatkannya kegiatan penyelenggara kliring lokal kedalam suatu unit tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai pemahaman mengenai kliring lokal serta mempunyai sistem administrasi yang memadai.

3. Memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran warkat dan atau DKE antar peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan telex.
4. Memiliki tempat penyelenggaraan kliring lokal yang mudah dijangkau oleh peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan tempat penyelenggaraan kliring lokal tersebut dapat terpisah dari lokasi kantor bank.

SKNBI diselenggarakan oleh :

1. Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKN) , yaitu unit kerja di kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional; dan
2. Penyelenggaraan Kliring Nasional (PKL) , yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Peserta

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Telah memperoleh izin izin usaha atau izin pembukuan kantor dari Bank Indonesia.

2. Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Bank telah mendatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dan Bank sebagai peserta.
4. Kantor Bank yang akan menjadi peserta menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat TPK dan jaringan komunikasi data baik main maupun backup.

Penyelenggaraan

Penyelenggaraan SKNBI menurut Bank Indonesia Direktorat dan Sistem Pembayaran Agustus 2005 terdiri dari 2 (dua) sub sistem, yaitu;

1. Kliring Debet

- a. Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian, digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit (cek,bilyet giro, nota debit dal lain-lain).
- b. Penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara lokal disetiap wilayah kliring oleh PKL.
- c. PKL akan melakukan perhitungan kliring debit berdasarkan DKE debit yang dikirim oleh peserta.
- d. Hasil perhitungan kliring debit secara lokal tersebut selanjutnya dikirim kesistem sentral kliring (SSK) untuk perhitungan secara nasional oleh PKN.

2. Kliring Kredit

- a. Digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).
- b. Penyelenggaraan kliring kredit dilakukan secara nasional oleh PKN.
- c. Perhitungan kliring kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE kredit yang dikirim peserta.

SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut ;

1. Sistem Sentral kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKN.
2. Komputer penyelenggaraan Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL.
4. Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh peserta

Pengiriman DKE

Pengiriman DKE menurut pendapat Bank Indonesia Direktorat Akunting Sistem Pembayaran Agustus 2005 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Untuk TPK yang terhubung dengan SSK (TPK online), pengiriman DKE dilakukan melalui JKD; sedangkan

2. Untuk TPK yang tidak terhubung dengan SSK (TPK offline), pengiriman DKE dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronis (disket, *flashdisk*, atau CD) yang disampaikan PKL.

JADWAL KLIRING

Dalam rangka memberikan keleluasan kepada pelaku ekonomi diseluruh indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk dapat melakukan transfer kredit dengan lancar , maka kliring kredit dilaksanakan 2 (dua) siklus kliring. Pengiriman DKE kredit pada siklus pertama dilakukan mulai pukul 08.15 s.d. 11.30 WIB sedangkan pengiriman DKE kredit pada siklus kedua dilakukan mulai pukul 12.45 WIB s.d. 15.30 WIB.

Untuk kliring debit pengiriman DKE debit ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan kliring lokal ke SSK pada pukul 15.30 WIB.

4.2. Warkat – warkat Kliring

1. Warkat

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa waktu kliring merupakan instrumen surat berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran yang lazim

digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah maupun antar bank, yaitu meliputi :

- a. Cek
- b. Bilyet giro
- c. Surat bukti penerimaan transfer (SBPT)
- d. Wesel Bank untuk Transfer (WBUT)
- e. Nota debet
- f. Nota kredit

Secara umum warkat kliring dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Warkat Kredit (Nota Kredit) dan Wark at Debet (seluruh warkat selain nota kredit).

A. Jenis Warkat Kliring

1. Cek

Cek dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan dalam pembayaran antar Bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas unjuk” dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*)

Pemindahan hak atas cek dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu untuk cek atas nama, pemindahan haknya dapat dilakukan dengan cara endorsement, sedangkan untuk cek atas unjuk, pemindahan haknya hanya dengan

memindahkan cek dari tangan ke tangan tanpa membutuhkan adanya endorsemen.

a. Syarat Formal Cek

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 178 UHD setiap cek harus memenuhi syarat formal sebagai berikut ;

1. Nama "Cek" harus termuat dalam teks;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayarnya (nama Tertarik);
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5. Tanggal dan tempat cek ditarik;
6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan penarik).

b. Penarikan kembali suatu cek

Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya pada bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal kadaluarsa kecuali ditarik kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 KUHD;

c. Daluarsa Cek

Daluarsa cek dihiung setelah lewat waktu 6 (bulan) terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukan, sedangkan tenggang waktu pengunjukan adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan.

Dalam perkembangn di indonesia, cek yang digunakan dalam transaksi pembayaran giral berkembang meliputi cek perjalanan (rupiah Travel's cek), cek deviden, cek cinderamata (gift cheque) dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank Indonesia.

2. Bilyet Giro

Bilyet Giro dalam kliring termasuk warkat debit yang lazim dipergunakan sebagai alat pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bak penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.

a. Syarat formal Bilyet Giro

Sesuai dengan ketentuan pasal-pasal No.28/32/KEP/DIR tanggal 4 juli 1995 tentang Bilyet giro, ditentukan bahwa Bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagai berikut ;

- Nama "Bilyet giro" dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
- Nama tertarik
- Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penarik
- Nama dan nomor rekening pemegang
- Nama bank penerima

- Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapannya
- Tempat dan tanggal penarikan
- Tandatangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel dengan persyaratan pembukuan rekening.

b. Pembatalan Bilyet Giro

Penarik tidak boleh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang waktu penawaran, yaitu;

1. Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh hari) terhitung sejak tanggal penarikan;
2. Bilyet giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening penarik;
3. Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.

Pembatalan Bilyet giro hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro, tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan.

c. Daluarsa Bilyet Giro

Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan trhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran.

Termasuk dalam jenis Bilyet giro ini adalah Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) yang merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank atas pembukaan rekening giro di Bank Indonesia.

3. Wesel Bank Untuk Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Wesel bank untuk transfer adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan sangat jarang (hampir tidak pernah) di gunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.

5. Nota Debet

Warkat kliring ini termasuk warkat debit dan lazimnya digunakan hanyaa dalam transaksi antar bank. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang di kliringkan lazimnya telah terlebih dahulu di perjanjikan dan dikomfirmasikan terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan

nota debet dimaksud kepada bank yang akan menerima nota debet untuk menghindarkan terjadinya penolakan warkat atau perselisihan.

Nota Debet dahulu lazim digunakan untuk pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) yang dilakukan dengan cara penerbitan nota debet oleh peserta yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk menagih pelunasan transaksi PUAB oleh debitur. Selanjutnya, mengingat terdapat penyimpangan dalam penggunaan Nota Debet, yaitu Nota Debet diterbitkan tanpa adanya transaksi yang memiliki dasar hukum yang sah (transaksi fiktif) yang memang sejak semula hanya dimaksudkan untuk mendebet sendiri atas beban Bank Indonesia (saldo overdraft) untuk kepentingan pemilik bank ybs. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dalam Surat Edaran No.31/4/UAK tanggal 4 April 1998 perihal penggunaan nota debet dalam kliring juncto Surat Edaran No. 31/10/UAK tanggal 29 April 1998 perihal penggunaan Nota Debet di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) juncto pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 juncto Surat Edaran NO. 1/10/DASP tanggal 31 Desember 1999 perihal penggunaan nota debet kliring, diatur sebagai berikut :

- a. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untung bank pengiriman atau untung nasabah bank pengirim;
- b. Nota Debet yang dapat diproses melalui kliring dibatasi pada nota debet dengan nominal setinggi-tingginya bernilai nominal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB. Dengan demikian pencarian kembali surat

sanggup (*aksep/promos*) atau pembayaran kembali dalam rangka transaksi PUAB juga dengan menerbitkan nota debet oleh pihak yang memberikan pinjaman. Tetapi dilakukan dengan penerbit nota kredit oleh pemijam pada tanggal jatuh tempo yang diikuti dengan pengembalian surat sanggup (*aksep/promes*) kepada pemijam secara langsung setelah pihak yang memijamkan menerima nota kredit tertentu.

c. Nota debet dengan nominal diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masih dapat dipergunakan dalam kliring dengan ketentuan diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditunjukan kepada bank atau nasabah bank yang berisi :

1. Tagihan realisasi dan atau biaya – biaya yang berhubungan dengan pembukuan atau perubahan L/C impor;
2. Tagihan pokok dan atau bunga kredit likuiditas proyek kredit Mikro (KL PKM), kredit likuiditas program kredit modal kerja Bank Indonesia Dalam Rangka pengembangan Bank perkreditan Rakyat (KL KMK-BPR), pembiayaan likuiditas pembiayaan modal kerja dalam rangka pengembangan bank perkreditan Rakyat Syariah (PL PMK-BPRS), Kredit likuiditas kredit kepada pengusaha kecil dan mikro melalui bank perkreditan Rakyat (KL KPKM-BPR), dan pembiayaan likuiditas pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui Bank perkreditan Rakyat Syariah (KL KPKM-BPRS).
3. Pelunasan tagihan-tagihan selain yang dimaksud dalam huruf c, apabila dilakukan melalui kliring maka harus dilakukan dengan menerbitkan nota

kredit oleh pihak yang berhutang/pihak pemijam atau dengan memperhiyungkan cek atau bilyrt giro yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang/pihak pijaman.

4. Bank yang menyampaikan warkat atau DKE nota debit dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bank yang menerima warkat atau DKE nota debit dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan penolakan atas nota debit dimaksud, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran.

6. Nota Kredit

Warkat kliring ini merupakan satu-satunya warkat kredit, yaitu warkat kliring yang lazim digunakan untuk transaksi antar bank maupun antar nasabah bank. Warkat kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain (transfer) untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut.

A. Syarat Warkat

1. Dinyatakan dalam mata uang rupiah;
2. Telah dapat ditagih pada saat dikliringkan;
3. Telah dibubuhi cap atau stempel kliring.

B. Jenis Warkat dan Sandi Transaksi

Jenis Warkat	Sandi Transaksi
Cek	00 - 09
Bilyet Giro	10 – 19
Wesel Bank Untuk Transfer	20 – 29
Surat Bukti Penerimaan Tansfer	30 – 39
Nota Debet < Rp. 10.000.000,00	40 – 49, kecuali
> Rp. 10.000.000,00	45
Nota Kredit	50 – 59

C. Proses Penyelesaian Warkat kliring dan Sistem Kliring

Terdapat tiga proses penyelesaian warkat kliring yang diungkapkan Kasmir yaitu;

1. Kliring keluar, yaitu membawa warkat-warkat kliring ke lembaga kliring dan menyerahkan kepada yang berhak. Kliring keluar terdiri dari penyerahan surat – surat debit keluar dan penyerahan nota debit keluar (LLG).
2. Kliring masuk, yaitu menerima warkat di lembaga kliring dan diproses di bank yang bersangkutan. Kliring masuk terdiri dari penerimaan surat-surat debit masuk dan nota kredit masuk (LLG);
3. Pengembalian kliring, yaitu pengembalian warkat- warkat kliring yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Ada beberapa alasan penolakan kliring yang diungkapkan Kasmir pada saat penerimaan warkat-warkat kliring dalam kliring masuk. Penolakan pembayaran cek atau BG disebabkan :

- a. Asal cek atau BG salah
- b. Tanggal cek atau BG belum jatuh tempo
- c. Materai tidak ada atau tidak cukup
- d. Jumlah yang tertulis diangka dan huruf berbeda
- e. Tanda tangan tidak sama atau tidak lengkap
- f. Caretan atau perubahan tidak ditanda tangani
- g. Cek atau BG sudah kadaluarsa
- h. Resi belum kembali
- i. Endorsment cek tidak benar
- j. Rekening sudah ditutup
- k. Dibatalkan penarik
- l. Rekening di blokir oleh berwajib
- m. Kondisi cek atau BG rusak atau tidak sempurna
- n. Dan alasan lainnya

4.3. Tujuan dan Manfaat kliring

Tujuan diterapkannya SKNBI pada penyelenggaraan kliring di Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran ritel serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya SKNBI adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank Indonesia

- a. Efisiensi waktu dan biaya, khususnya dalam hal :
 - 1) operasional kliring dengan ditiadakannya fisik warkat kredit;
 - 2) maintenance aplikasi kliring dengan digunakannya sistem yang terintegrasi di seluruh wilayah kliring.
- b. Tersedianya jangkauan transfer antar bank melalui kliring yang lebih luas dengan diakomodirnya kliring antar wilayah untuk transfer kredit.
- c. Memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS).

2. Bagi Bank

- a. Efisiensi biaya operasional bank dalam pencetakan dan proses administrasi warkat kredit.
- b. Semakin luasnya jangkauan layanan bank kepada nasabah.

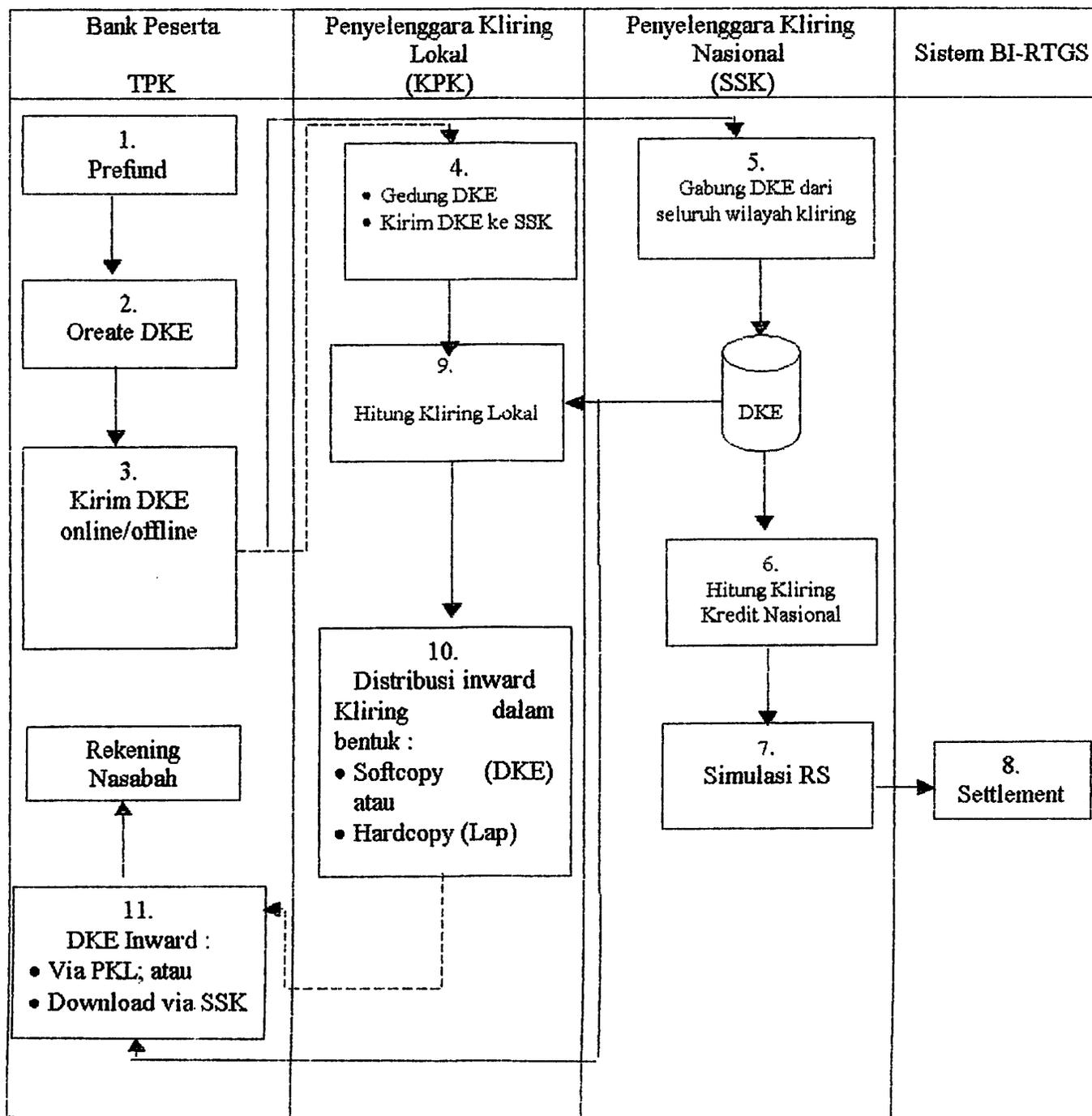
Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem pembayaran dengan adanya penyelenggara kliring untuk transaksi antar bank dimaksud adalah:

- a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran (transfer of value) efektif dan efisien dan aman.

- b. Bagi Bank , merupakan salah satu *advantage service* kepada nasabah, menjadi fee based income, juga dapat salah satu upaya dalam menggalang dana pihak ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.
- c. Bagi Bank sentral sebagai penyelenggara , dapat secara cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat, baik antar nasabah Bank maupun antar Bank sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakannya secara lebih akurat dan tepat.

Secara umum mekanisme kliring menurut bank indonesia Direktorat Akunting dan sistem pembayaran Agustus 2005 ada dua yaitu kliring debit dan kliring kredit :

KLIRING KREDIT



Secara umum mekanisme kliring kredit adalah sebagai berikut :

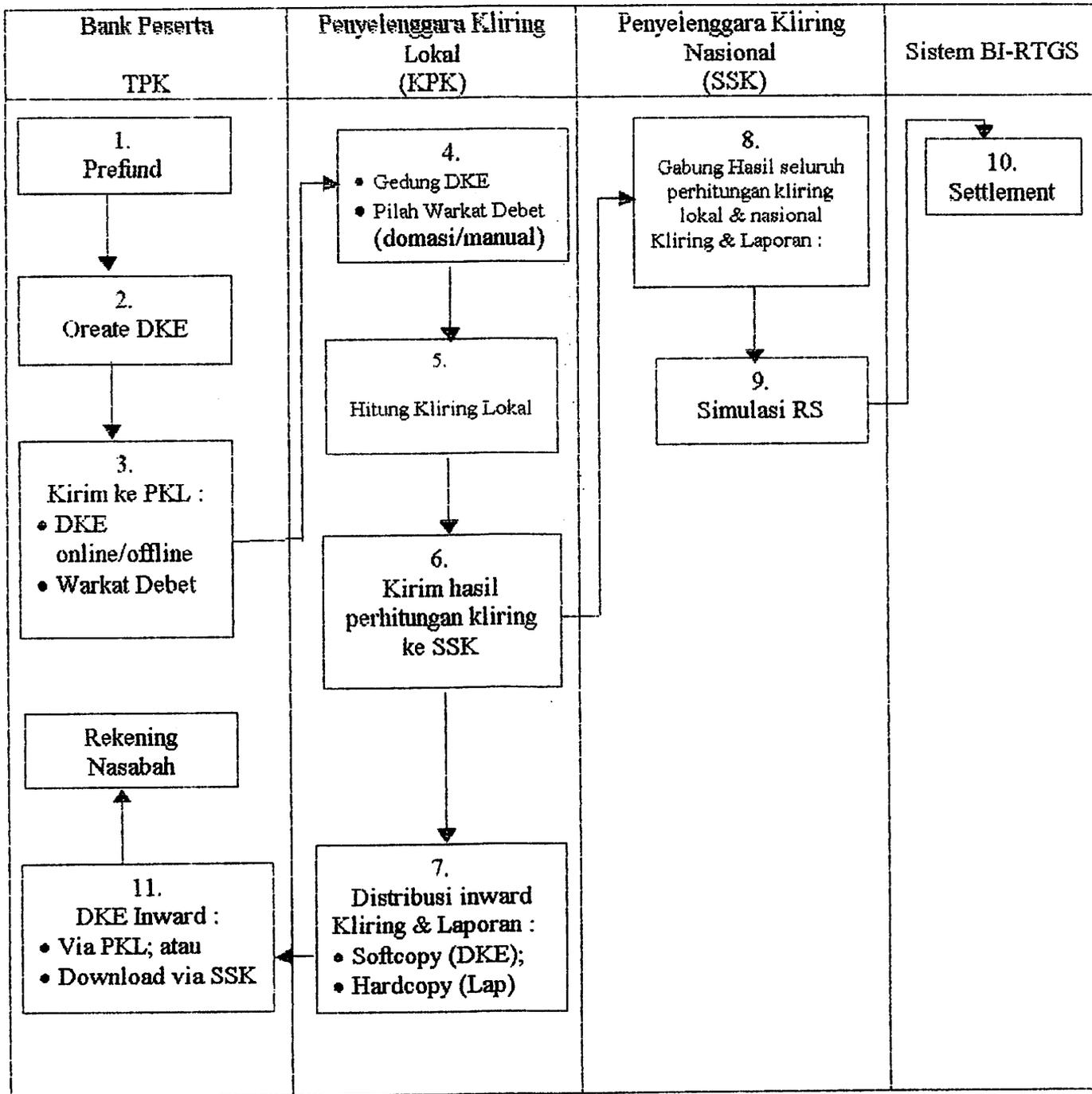
1. Sebelum kegiatan kliring kredit dimulai, Bank wajib menyediakan prefund.
2. Peserta pembuat DKE kredit berdasarkan aplikasi transfer.
3. Mengirimkan DKE kredit ke SSK.

Mengirimkan DKE kredit dapat dilakukan secara online, tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.

4. Untuk peserta yang menggunakan TPK online, penyampaian DKE kredit dilakukan dengan menggunakan media rekam data elektronik (disket, *Flashdisk* atau CD) yang diserahkan ke PKL dan selanjutnya DKE tersebut oleh PKL dikirim ke SSK.
5. SSK atau melakukan penggabungan dan perekaman seluruh DKE kredit yang diterima.
6. Atas dasar DKE kredit yang diterima, SSK melakukan perhitungan kliring kredit secara nasional.
7. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS. Apabila hasil simulasi FtS tersebut menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambahkan kekurangan atas prefund sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan terdapat DKE yang tidak ter-cover oleh prefund, maka DKE yang tidak ter-cover tersebut akan dikembalikan kepada peserta dan tidak diperhitungkan dalam kliring.

8. Setelah batasakhir penambahan frefund, SSK melakukan perhitungan hasil kliring kredit nasional. Hasil perhitungan tersebut akan dibukukan kerekening giro Bank di sistem BI-RTGS.
9. Setelah SSK selesai melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, KPK dapat *men-dowload* DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SSK.
10. PKL dapat mendistribusikan DKE *inward* dalam bentuk media rekam data elektronik (disket, *flashdisk* atau CD) dan laporan hasil kliring kredit kepada peserta yang menggunakan jenis TPK *offline*.
11. Setelah SSK selesaikan melakukan proses perhitungan kliring kredit secara nasional, peserta dengan menggunakan TPK online dapat mendonwload DKE *inward* dan laporan hasil kliring kredit dari SS.

KLIRING DEBET



Secara umum mekanisme kliring debit menurut Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Agustus 2005 adalah sebagai berikut :

01. Sebelum kegiatan kliring debit dimulai, Bank wajib menyediakan *refund*.
02. Peserta pembuat DKE debit berdasarkan warkat debit yang akan dikliringkan.
03. Mengirimkan DKE debit dan warkat debit ke PKL. Pengiriman DKE debit dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung dengan jenis TPK yang digunakan oleh peserta.
04. Selanjutnya PKL akan melakukan penggabungan dan perekaman atas DKE debit yang telah lolos validasi. Sementara untuk warkat debit akan dipilih berdasarkan Bank tertuju:
 - a Secara otomatis dengan menggunakan mesin reader sorter berteknologi image, bagi PKL yang telah menerapkan sistem pilih warkat otomatis: atau
 - b Secara manual oleh masing-masing peserta dilokasi PKL, bagi PKL yang belum menerapkan sistem pilih warkat otomatis.
05. Atas dasar DKE debit yang diterima, PKL akan melakukan perhitungan kliring debit.
06. PKL mengirimkan hasil perhitungan kliring debit lokal ke SSK.
07. Mencetak laporan hasil kliring debit untuk selanjutnya didistribusikan kepada seluruh peserta bersamaan dengan warkat debit.

08. Seluruh hasil perhitungan kliring debit lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK, akan dilakukan perhitungan kliring debit secara nasional.

09. Selanjutnya SSK melakukan simulasi FtS.

10. Apabila hasil perhitungan kliring debit nasional,

a. Bank ‘‘menang kliring (posisi kredit)’’, seluruh cash perefund yang telah disediakan dikredit kembali ke rekening giro Bank bersamaan dengan pengkreditan hasil kliring yang bersangkutan.

b. Bank ‘‘kalah kliring (posisi debit)’’, sistem secara otomatis akan melakukan penyelesaian atas kewajiban Bank tersebut dengan urutan sebagai berikut :

⇒ Pertama-tama sistem akan menggunakan *cash prefund* yang telah disediakan Bank;

⇒ Apabila kewajiban Bank masih lebih besar dari *Cash prefund*, maka kekurangannya akan dipenuhi dari dana yang tersedia pada rekening giro Bank;

⇒ Apabila kewajiban Bank lebih besar dari *cash prefund* dan saldo pada rekening giro, maka atas kekurangan saldo rekening giro Bank tersebut akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-Kliring) berdasarkan *collateral prefund* yang disediakan oleh Bank.

- ⇒ Apabila kekurangan saldo rekening giro Bank masih belum dapat ditutup dengan FLI-Kliring/FLIS-Kliring, maka kekurangan tersebut ditutup dengan surat berharga Bank yang ada pada rekening FLI-RTGS/FLIS-RTGS.
- ⇒ Pelunasan FLI-Kliring/FLIS-Kliring dan FLI-RTGS/FLIS-TGS harus dilakukan sebelum tutup Sistem BI-TGS.
- ⇒ Apabila sampai dengan akhir hari FLI-Kliring/FLIS-Kliring belum dapat dilunasi maka akan menjadi Fasilitas Pendataan Jangka Pendek (FPJP) atau fasilitas Pendapatan Jangka Pendek Syarah (FPJPS).

11. Setelah proses kliring debit selesai, peserta dapat memperoleh DKE inward dengan cara mendownload dari SSK atau dari KPK melalui media rekam data elektronik (disdet, *flashdisk*, atau CD)

5. Pengertian SKNBI

Pengertian SKNBI menurut Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Agustus 2005 adalah sistem kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaiannya akhir dilakukan secara nasional.

C. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapatlah dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

“ Melalui Proses Kegiatan Kliring Nasional (SKNBI) tetap mengacu kepada ketentuan yang ada, maka proses kegiatan Kliring Nasional dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada dan hal ini akan berdampak dalam upaya memperlancar sistem pembayaran di wilayah kliring Samarinda”.

D. Definisi konseptual

Secara umum Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia ialah “kegiatan mengadakan tukar-menukar warkat dari bank satu dengan bank lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya.

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang pengaturan, kontrak / perjanjian fasilitasoperasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban

pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran nilai antarperorangan, bank, atau lembaga lainnya baik domestik maupun antarnegara.

Sedangkan Prosedur kliring hanya meliputi kegiatan – kegiatan yang erat hubungannya dengan kliring, sedangkan kegiatan didalam kantor bank peserta yang antara lain berupa pengecekan warkat-warkat yang diterima dari lembaga kliring dengan dokumen yang ada dikantor, tidak diuraikan di dalam prosedur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang digunakan untuk penyelesaian transaksi (setelmen) baik antar perorangan, maupun antar bank. Dalam prakteknya, transaksi pembayaran di Indonesia dilakukan dengan instrumen tunai dan non tunai. Untuk instrumen pembayaran tunai menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Sedangkan untuk transaksi pembayaran non tunai instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat seperti cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit, instrumen yang berbasis kartu seperti kartu kredit, kartu ATM, kartu kredit, serta instrumen yang berbasis internet atau telepon.

Kliring terjadi pada saat dua bank masing-masing menetapkan sejumlah pemilikan yang dipertukarkan melalui warkat. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian kewajiban dan tagihan melalui kliring dilakukan dengan cara menyerahkan warkat-warkat melalui lembaga kliring. Setiap warkat harus dinyatakan dalam rupiah, dengan nilai nominal yang dikliringkan sama dengan nominal pada warkat dan harus pada jatuh tempo selambat-lambatnya saat kliring. Pihak-pihak yang terlibat dalam kliring terdiri dari lembaga penyelenggaraan kliring dan peserta kliring. Yang dimaksud dengan lembaga

penyelenggaraan kliring adalah Bank Indonesia atau bank/pihak lain yang ditunjukan oleh Bank Indonesia. Sementara itu, peserta kliring adalah bank-bank yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia sebagai peserta kliring.

B . Perincian Data Yang Diperlukan

Rincian data yang diperlukan untuk mendukung dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Gambaran Umum Bank Indonesia Samarinda
- b. Struktur Organisasi Bank Indonesia Samarinda
- c. Visi dan Misi Bank Indonesia Samarinda
- d. Bank peserta kliring Wilayah KBI Samarinda

C. Jangkauan Penelitian

Sasaran penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan pada Bank Indonesia Samarinda yang berlokasi di Jl. Gajah Mada No.1 Samarinda. Dimana penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya kepada "Kliring" yang dilakukan Bank Indonesia Samarinda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (Field work research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan dengan menggunakan teknik sebagai berikut :
 - a). Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengandakan pengamatan langsung ke obyek atau tempat penelitian.

- b) Wawancara yaitu, teknik pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan.
2. Penelitian Pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggandakan riset keperpustakaan dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan.

E. Alat Analisa dan Pengujian Hipotesis

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam hal ini penulis menggunakan flowchart tentang sistem kliring yang ada pada Bank Indonesia Samarinda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A . Gambaran Umum Bank Indonesia Samarinda

Kantor Bank Indonesia (KBI) Samarinda didirikan pada tahun 1962 di jalan Awang Long yang sekarang telah menjadi Kantor Polisi Militer (POM), dan pada tahun 1974 Kantor Bank Indonesia Samarinda pindah kegedung baru di jalan Gajah Mada No. 1 Samarinda. Kantor Bank Indonesia Samarinda KBI kelas III (tiga) yang dipimpin oleh pemimpin Bank Indonesia dan dibantu oleh dua orang Kepala Bidang yaitu, Kepala Bidang Sistem Pembayaran Manajaemen Intern (SPMI), serta Kepala Bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan (EMP).

Kepala Bidang Sistem Pembayaran Manajemen Intern (SPMI) membidangi tiga seksi yaitu Seksi Akunting Kliring, Seksi Kas, dan Pengedaran Uang, serta Seksi Sumber Daya dan Logistik. Sedangkan kepala bidang Ekonomi Moneter dan perbankan (EMP) juga membidangi tiga seksi yaitu Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (PKM), Seksi Stastk dan Kajian Moneter (SKEM) serta Pengawas Bank (PB).

Tugas pokok Bank Indonesia Samarinda tercermin dari kegiatan yang dilakukan melalui masing-masing bidang dan seksi yaitu :

1. Seksi Kas dan Pengedaran

Berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal kepada masyarakat dan perbankan baik jumlah maupun pecahan rupiah.

2. Seksi Akunting dan Kliring

Membantu mengatur dan memperlancar transaksi pembayaran baik melalui kliring maupun Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI – RTGS).

3. Seksi Pelaksanaan Kebijakan Moneter (PKM)

Memberikan bantuan teknis kepada perbankan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam pengembangan Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM), mengawasi dan membina Pedagang Valuta Asing (PVA), serta menjalin hubungan dengan pihak ketiga lainnya (kehumasan).

4. Seksi Statistik Kajian Ekonomi Moneter (SKEM)

Menyediakan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) bagi stakeholder, melakukan kajian / penelitian.survey bekerjasama dengan instansi lain/akademisi mengenai kegiatan dunia usaha serta memberikan informasi penting kepada stakeholder.

5. Pengawas Bank (PB)

Mengawasi dan membina perbankan di Kalimantan Timur.

6. Seksi Sumber Daya Manusia

Mengkoordinir pegawai, logistik, dan keamanan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia Samarinda.

Sasaran strategis Bank Indonesia Samarinda adalah :

1. Informasi yang berkualitas dalam rangka mendukung kebijakan Kantor Pusat dan pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
2. Peningkatan sistem perbankan yang sehat dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi daerah.
3. Kelancaran dan keamanan sistem pembayaran di wilayah kerja.
4. Pengelolaan keuangan sater secara efektif dan efisien.
5. Mengoptimalkan kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja.]
6. Meningkatkan pengawasan bank yang efektif yang mendukung pengembangan ekonomi di wilayah kerja.
7. Meningkatkan pelayanan dan prasarana sistem pembayaran.
8. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang efektif kepada stakeholders.
9. Mendukung peranan prinsip-prinsip Good Governance.
10. Memperkuat organisasi dan mengembangkan SDM yang berkompetisi tinggi dengan dukungan budaya kerja yang berbasis pengetahuan.

B. Visi dan Misi Bank Indonesia Samarinda

Visi Bank Indonesia Samarinda adalah menjadi lembaga yang dapat di percaya di daerah.

Misi Bank Indonesia Samarinda adalah merupakan bagian jaringan kerja bank Indonesia yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia serta melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah, khususnya di Kalimantan Timur.

C. Struktur Organisasi Bank Indonesia Samarinda

Struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap kegiatan yang direalisasikan, dengan adanya struktur organisasi para pekerja dapat mengetahui sejauh mana wewenang dan tanggung jawab yang ada pada mereka. Dengan demikian pekerjaan pada Kantor Bank Indonesia Samarinda tersebut tidak akan simpang siur serta akan berjalan dengan baik.

Keterangan :

1. Pemimpin Bank Indonesia

2. Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern, membidangi tiga seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Akunting dan Kliring

Bertugas mengatur dan mempelancar transaksi pembayaran baik melalui kliring maupun melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI – RTGS).

b. Kasir Senior Seksi Kas dan Pengedaran

Bertugas memenuhi kebutuhan uang kartal kepada masyarakat dan perbankan baik jumlah maupun pecahan rupiah.

c. Kepala Seksi

Bertugas mengkoordinir pegawai, logistik, dan keamanan demi kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Bank Indonesia Samarinda.

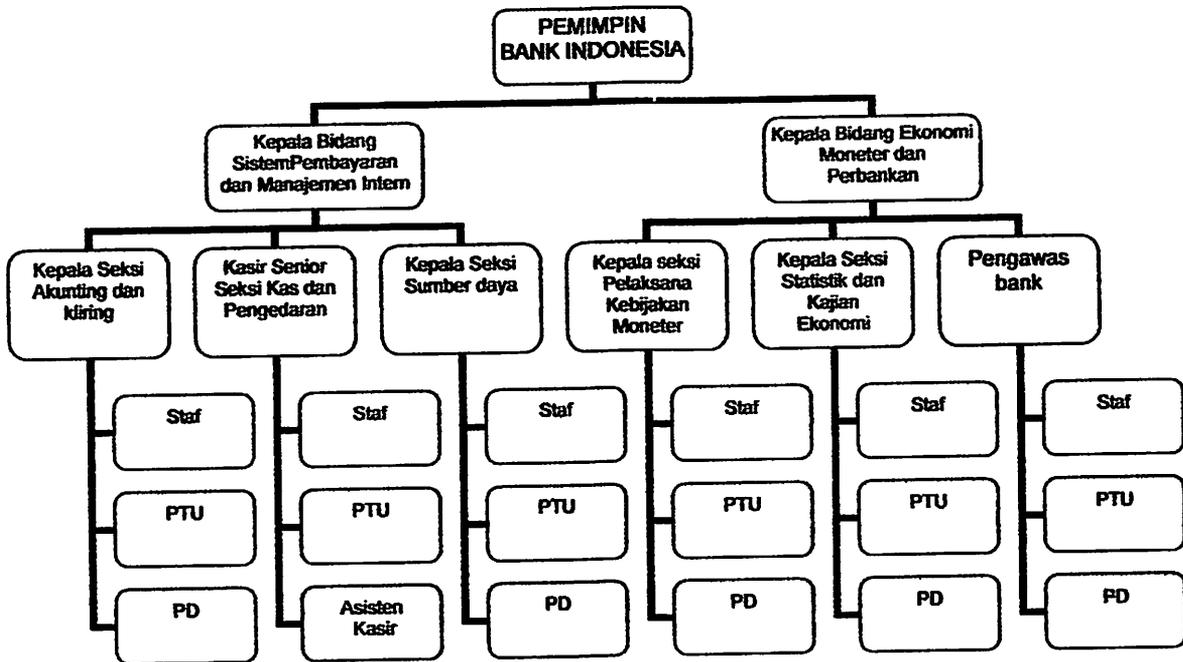
3. Kepala Bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan melindungi tiga seksi yaitu;

a. Kepala Seksi Pelaksana Kebijakan moneter

Bertugas memberikan bantuan teknis kepada perbankan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),

mengawasi dan membina Pedagang Valuta Asing (PVA), serta menjalin hubungan dengan pihak ketiga lainnya (kehumas).

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BANK INDONESIA SAMARINDA



Keterangan :

- 1. Pemimpin Bank Indonesia**
- 2. Kepala Bidang Sistem Pembayaran dan Manajemen Intern, membidangi tiga seksi yaitu :**
 - a. Kepala Seksi Akunting dan Kliring**

Bertugas mengatur dan mempelancar transaksi pembayaran baik melalui kliring maupun melalui Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI – RTGS).
 - b. Kasir Senior Seksi Kas dan Pengedaran**

Bertugas memenuhi kebutuhan uang kartal kepada masyarakat dan perbankan baik jumlah maupun pecahan rupiah.
 - c. Kepala Seksi**

Bertugas mengkoordinir pegawai, logistik, dan keamanan demi kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Bank Indonesia Samarinda.
- 3. Kepala Bidang Ekonomi Moneter dan Perbankann melindungi tiga seksi yaitu;**
 - a. Kepala Seksi Pelaksana Kebijakan moneter**

Bertugas memberikan bantuan teknis kepada perbankan dalam rangka penguatan kelembagaan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),
mengawasi dan membina Pedagang Valuta Asing (PVA), serta menjalin hubungan dengan pihak ketiga lainnya (kehumas).

b. Kepala Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter

Bertugas memberikan data statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) bagi stakeholder, melakukan kajian/penelitian/survey bekerjasama dengan instansi lain/akademisi mengenai kegiatan dunia usaha serta memberikan informasi penting kepada stakeholder.

c. Pengawas Bank

Bertugas mengawasi dan membina perbankan di Kalimantan Timur.

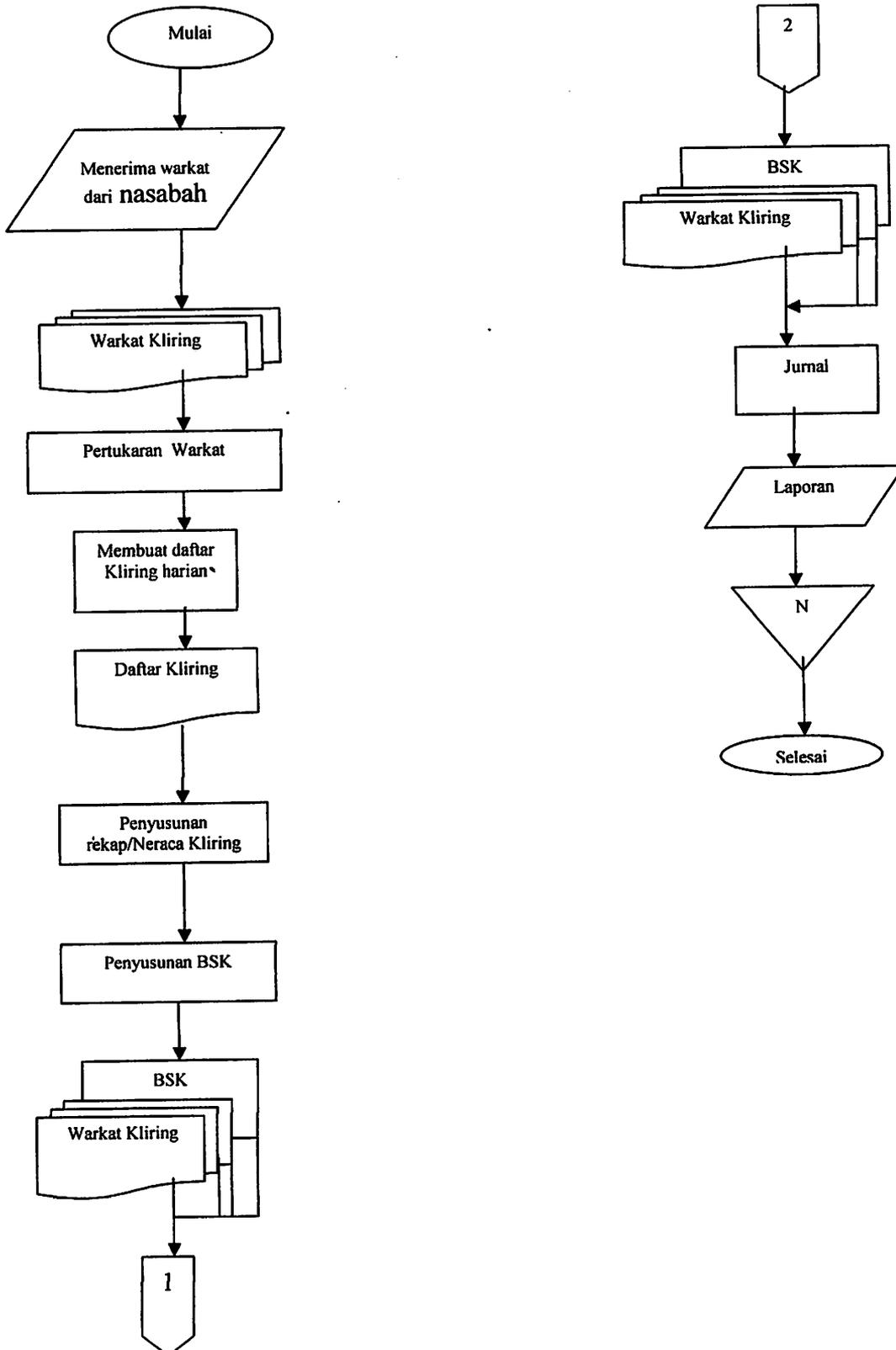
BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

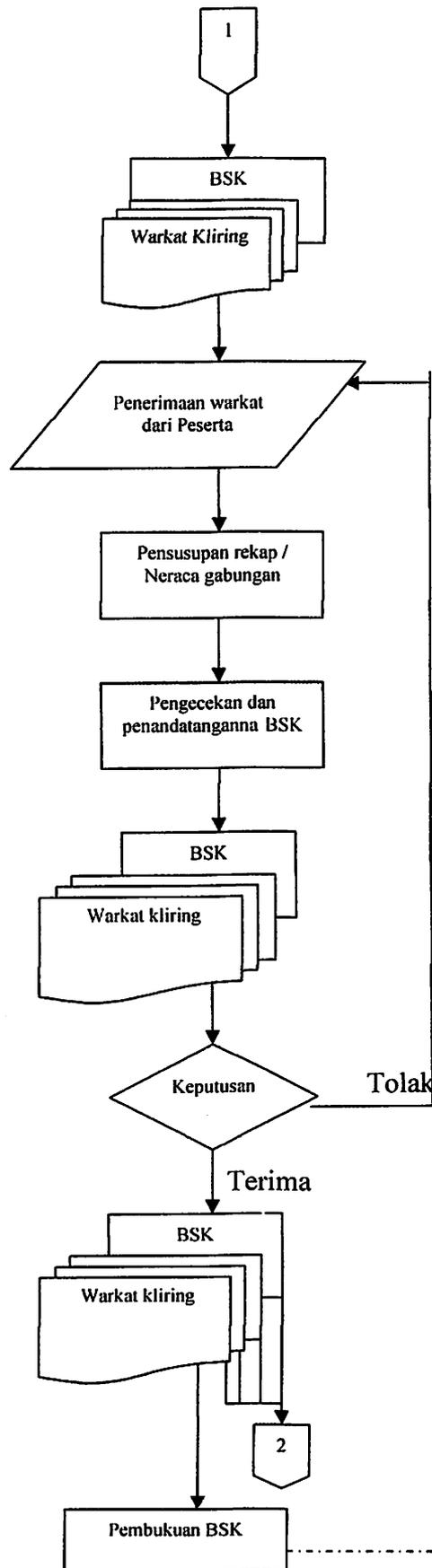
A. Analisis

1. Flowchart Sistem Kliring Manual

Peserta Kliring



Penyelenggara Kliring (BI)



Keterangan :
 BSK = Bilyet Saldo
 Sumber : Bank Indonesia Samarinda

Flowchart Sistem Kliring manual

Dibutuhkan ke rekening
 Masing-masing bank di Bank
 Indonesia

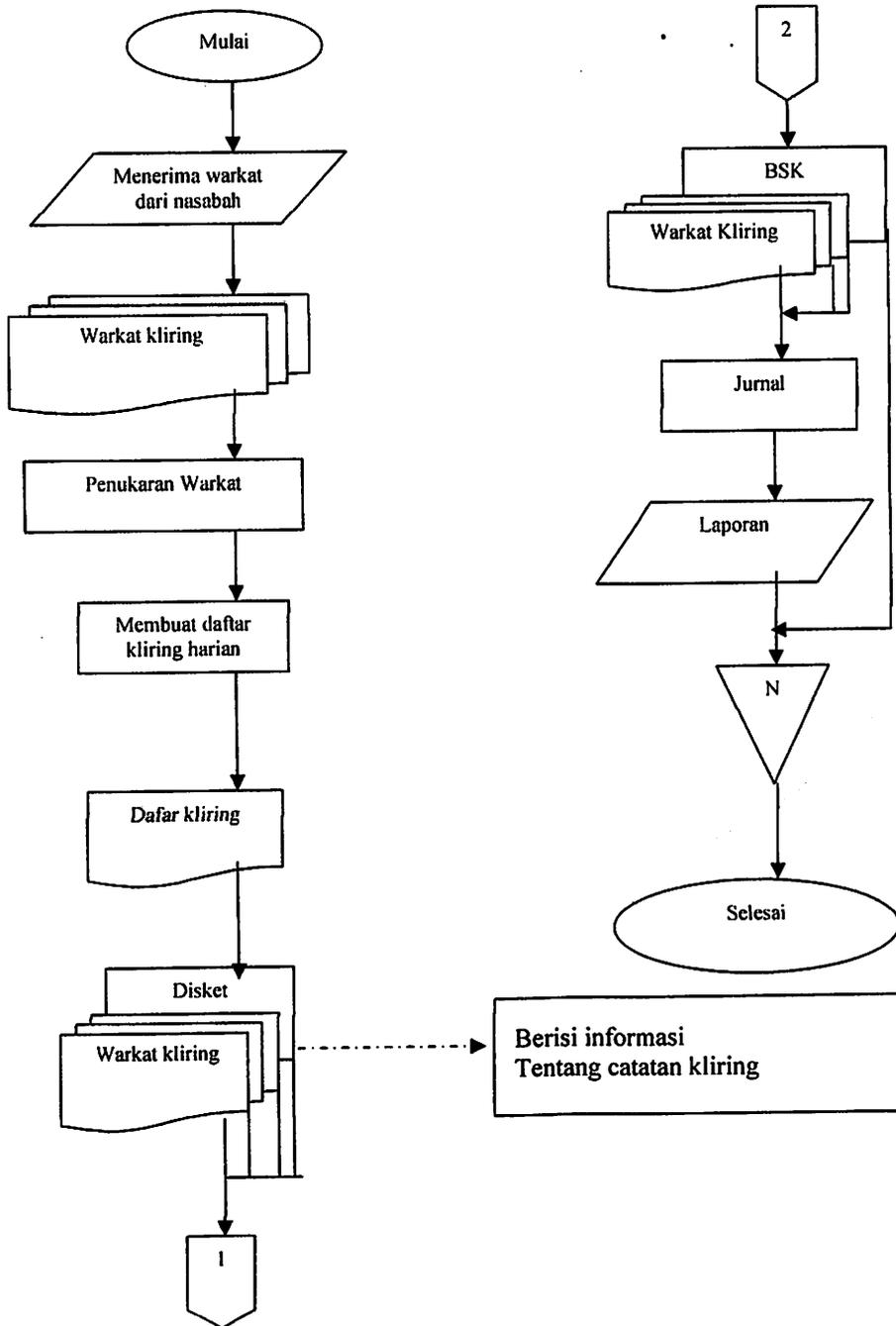
Sistem kliring manual merupakan sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan bilyet saldo kliring serta pemilahan dan pertukaran warkat dilakukan secara manual. Sistem kliring manual pada umumnya dilakukan oleh bank atau pihak lain yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring yang berada di kota kecil atau wilayah yang jauh dari kantor bank Indonesia, dengan jumlah bank peserta kliring dan jumlah warkat kliring sedikit.

Pada sistem ini bank beserta kliring yang menerima warkat debit ataupun warkat kredit, akan mencatat dalam buku harian kliring yang dibuatnya. Atas dasar buku harian kliring tersebut akan dibuatkan daftar kliring untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan neraca kliring. Kegiatan-kegiatan diatas dan pertukaran warkat kliring diantara peserta kliring dilakukan secara manual. Begitu juga dengan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara kliring, seperti penyusunan neraca gabungan, pengecekan dan pembuatan laporan kliring dilakukan secara manual.

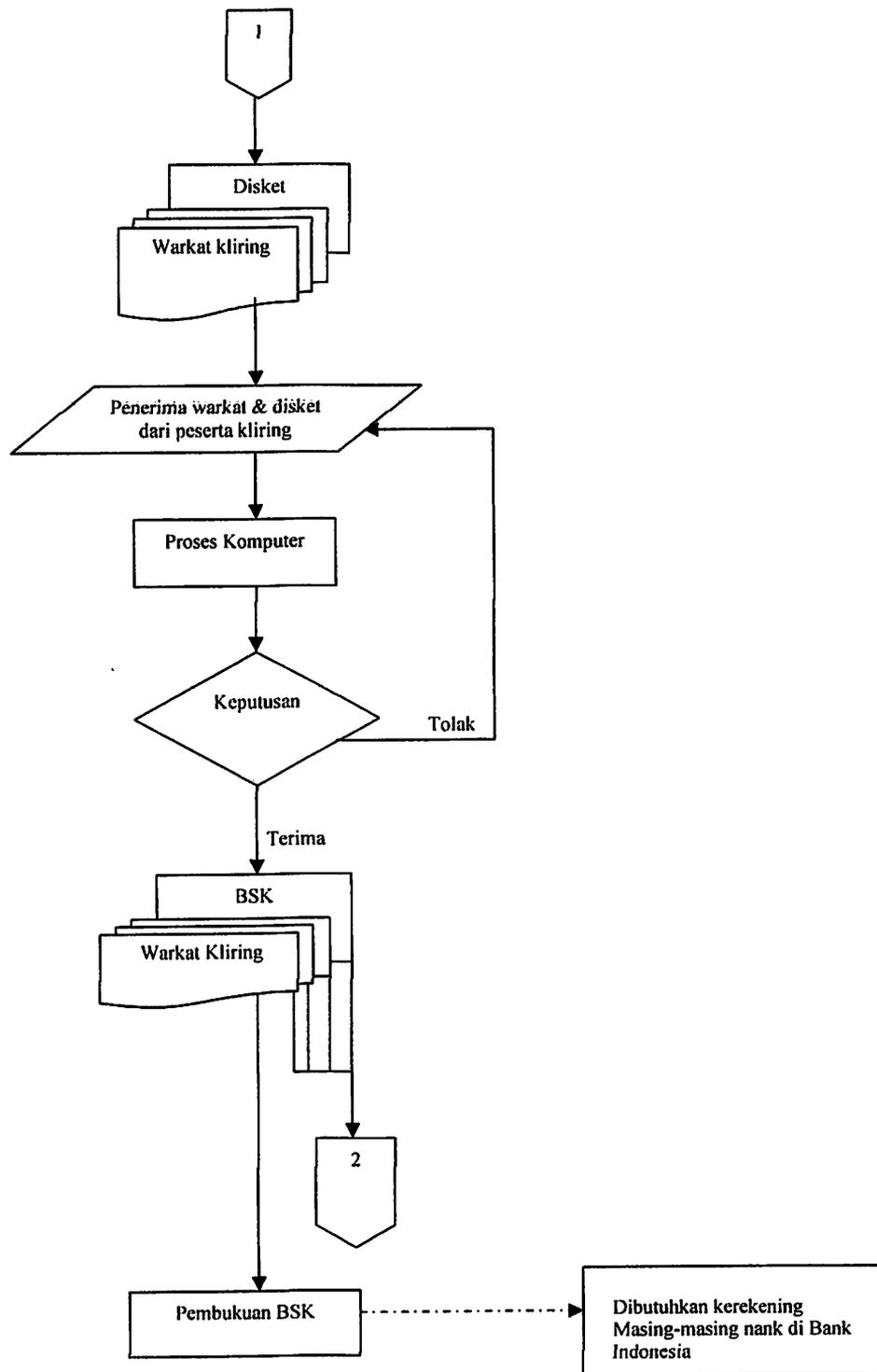
Setelah proses kliring di lembaga penyelenggara kliring selesai, masing-masing bank peserta kliring akan menyelesaikan transaksi pada rekening nasabahnya dan membuat daftar warkat yang ditolak atau dikembalikan. Sedangkan penyelenggara kliring dalam hal ini bank atau pihak lain yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia akan menyampaikan laporan-laporan kliring kepada Bank Indonesia.

2. Flowchart Sistem Kliring Semiotomasi

Peserta Kliring



Penyelenggaraan Kliring (BI)



Keterangan :
BSK = Bilyet Saldo Kliring

Sumber : Bank Indonesia Samarinda

Sistem kliring semiotomasi adalah sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan dan pertukaran warkat dilakukan secara manual. Sistem kliring semiotomasi pada umumnya dilakukan kantor Bank Indonesia dengan jumlah Bank peserta kliring dan jumlah warkat kliring sedikit.

Pada sistem ini, Bank peserta kliring yang menerima warkat-warkat kliring dari nasabahnya akan membuat daftar kliring dan melakukan pencatatan data kliring dengan komputer untuk disimpan dalam disket. Kemudian disket tersebut oleh Bank peserta kliring disampaikan kepada penyelenggara kliring untuk dilakukan penghitungan posisi setoran dan pembuatan laporan kliring (bilyet saldo kliring). Sementara itu, warkat-warkat kliring dipertukarkan secara manual diantara peserta kliring.

Setelah pembuatan laporan kliring selesai, Bank penyelenggara kliring (Bank Indonesia) akan membukukan bilyet saldo kliring rekening masing-masing bank peserta kliring yang ada di bank penyelenggara kliring. Sedangkan peserta kliring akan menyelesaikan transaksi pada rekening nasabahnya dan membuat daftar warkat yang ditolak.

B . Pembahasan

Dari hasil analisis di ketahui bahwa sistim kliring manual hanya dilakukan dikota kecil atau wilayah yang jauh dari kantor bank indonesia. Sistem ini digunakan dikota kecil karena terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penggunaan sistem kliring secara on line atau penggunaan komputer tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk wilayah dimana bank indonesia sebagai penyelenggara kliring dapat menggunakan sistem kliring semiotomasi,otomasi dan elektronik sesuai dengan jumlah bank peserta kliringdan jumlah warkat kliring.

Bank Indonesia samarinda sebagai penyelenggara kliring untuk wilayah samarinda menetapkan penggunaan sistem kliring semiotomasi untuk penyelesaian pembayaran diantara peserta kliring, karena sesuai dengan jumlah bank peserta kliring dan jumlah warkat kliring yang tidak terlalu banyak. Penggunaan sistem kliring semiotomasi ini akan lebih memberikan kemudahan bagi peserta kliring dan penyelenggara kliring dalam melakukan proses kliring dibandingkan dengan penggunaan sistem kliring manual, karena bank peserta kliring melakukan pencatatan data kliring dengan komputer dan disimpan dalam disket yang kemudian diserahkan kepada penyelenggara kliring untuk dibuatkan penghitungan posisi setelman dan pembuatan laporan kliring. Sehingga tidak perlu melakukan perhitungan dan pembuatan lapora kliring secara manual.

Kliring diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara kliring dibuka untuk umum. Pertemuan kliring diadakan dua kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara kliring.

Pertemuan kliring I

Pada kliring pertama, setiap peserta kliring akan berkumpul ditempat kliring untuk menyerahkan warkat-warkat kliring kepada bank peserta kliring lainnya, dan menyampaikan file dalam disket yang berisi informasi tentang catatan kliring kepenyelenggara kliring (bank Indonesia) untuk penghitungan posisi setlemen dan pembuatan laporan kliring (bilyet saldo kliring).

Pertemuan kliring II

Pada kliring kedua, bank peserta kliring akan saling mengembalikan warkat-warkat kliring apabila terjadi penolakan. Sedangkan untuk warkat yang dapat dikliringkan penyelenggara kliring (Bank Indonesia) akan membuat perhitungan posisi setlemen dan laporan kliring (bilyet saldo kliring) yang kemudian akan dibukukan rekening masing-masing bank peserta kliring di Bank Indonesia.

Jika salah satu peserta kliring karena suatu hal tidak dapat ikut serta dalam pertemuan kliring, peserta tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan kepada penyelenggara kliring sepuluh hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada semua peserta kliring sekurang-kurangnya dua hari kerja sebelum hari efektif.

Dari hasil kliring tersebut dapat diketahui apakah Bank tersebut menang kliring atau kalah kliring. Bagi Bank yang menang kliring artinya jumlah warkat

tagihan kliringnya melebihi pembayaran warkat kliringnya sehingga terdapat saldo kemenangan (saldo kredit). Sebaliknya bagi bank yang kalah kliring, pembayaran warkat kliringnya lebih besar dari penerimaan warkat kliringnya (saldo debit).

Warkat –warkat yang dikliringkan tidak semuanya memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan dalam pelaksanaannya warkat tersebut ditolak dengan alasan sebagai berikut

01. Asal warkat salah
02. Tanggal warkat belum jatuh tempo
03. Materi tidak ada atau tidak cukup
04. Jumlah yang tertulis diangka dan dihuruf berbeda
05. Tandatangan tidak sama atau tidak lengkap
06. Coretan atau perubahan tidak ditandatangani
07. Warkat sudah kadaluarsa
08. Resi belum kembali
09. Rekening sudah ditutup
10. Dibatalkan penarik
11. Rekening diblokir oleh berwajib
12. Kondisi warkat rusak atau tidak sempurna
13. Dan alasan lainnya

Pihak-pihak yang terlibat didalam kliring yang terdiri dari :

1. Lembaga penyelenggara kliring

Lembaga penyelenggara kliring adalah Bank Indonesia atau bank/pihak lain yang ditunjukan oleh bank indonesia.bank/pihak lain yang ditunjuk ini harus memenuhi persyaratan antara lain, kemampuan administrasi,tenaga pimpinan dan pelaksana, ruang kantor, peralatan komunikasi,dan lain-lain. Selain itu bank tersebut harus menyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu kepada bank indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.

2. Peserta kliring

Peserta kliring adalah bank-bank yang telah memperoleh ijin dari bank Indonesia sebagai peserta kliring.peserta kliring di bedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Bank peserta kliring langsung

Bank kliring langsung merupakan bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara langsung dalam pertemuan kliring. Serta dapat mengirim dan menerima pembayaran atas namanya sendiri .

b. Bank peserta kliring tidak langsung

Bank peserta kliring tidak langsung merupakan bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta kliring dan yang memperhitungkan warkatnya adalah bank yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.peserta kliring tidak langsung hanya dapat mengirim dan menerima pembayarabn melalui bank peserta kliring langsung.

Untuk menjadi peserta kliring ditetapkan beberapa syarat yang harus memenuhi yaitu sebagai berikut:

01. Bank yang bersangkutan harus mempunyai ijin usah dari menteri keuangan.
02. Kendaan adminitrasi dan keuangan bank tersebut memungkinkan bank itu untuk memenuhi kewajibanyah dalam kliring.
03. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelongaran tarik kredit yang diberikan oleh bank tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syaratmodal disetor minimum bagi pendirian bank bank baru diwilayah bank yang bersangkutan
04. Bagi penyelenggara bank-bank peserta diwajibkan untuk menyettor jaminam kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit jaminan kliring ini berlaku sela enam bulan terhitung sejak tanggal penyeforan.
05. Bank diwajibkan ikut serta dalam kliring, setelah dapat persetujuan bank indonesia.

Kliring dimasukdkan untuk memudahka masalh hutng piutang anatar bank yang timbul dari tranksaksi giral. Dalam pelaksanaanya kliring dilakukan dengan melalui pihak ketiga (penyelenggara kliring) dan dengana cara bank perserta kliring akan mengumpulkan terlebih dahulu semua tagihan dan kewajiban dalam periode tertentu dan kemudian dibuatkan posisi final sebelum proses setelmen. Kliring pada umumnya untuk tranksaksi dibawah Rp.100.000.000,00

Dengan demikian pelaksanaan kliring pada Bank Indonesia Samarinda sesuai dengan teori-teori yang telah disajikan pada bab II, dimana kliring pada umumnya merupakan sistem penyelesaiannya transaksi multilateral berbasis tertunda (batch) dan secara netto (net). Multilateral karena kliring dilakukan dengan melalui pihak ketiga yaitu penyelenggara kliring (Bank Indonesia). Batch karena intruksi pembayaran dikumpulkan terlebih dahulu, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada waktu tertentu. Net dilakukan karena setiap bank membuat setiap posisi final untuk semua bank mitra kerjanya, sehingga hanya akan ada satu satelmen untuk setiap Bank.

Setiap bank peserta kliring diwajibkan memelihara sejumlah saldo alat liquid dalam bentuk giro pada Bank Indonesia untuk menampung semua penarikan dan penyetoran nasabah masing-masing yang akan mengakibatkan bertambahnya dan berlurangnya saldo giro tersebut.

Melalui sistem kliring ini masyarakat dapat dengan mudah dan akan merasa lebih aman dalam melakukan transaksi pembayaran. Dengan demikian, sistem pembayaran pun akan berjalan dengan lancar dan akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian.

kliring dilakukan dengan komputer dan disket untuk proses transaksi antar bank. Sistem ini biasanya disebut semiotomasi kliring lokal.

3. Prosedur kliring dilakukan dengan sistem batch yaitu bank-bank peserta kliring mengumpulkan terlebih dahulu instruksi pembayaran yang diterimanya, sedangkan pemrosesannya dilakukan kemudian dalam jumlah tertentu sekaligus pada satu waktu tertentu. Dan juga dilakukan dengan proses netting yaitu bank peserta kliring membuat satu posisi final untuk semua bank mitra kerjanya, sehingga hanya akan ada satu salinan untuk setiap bank.
4. Peranan penting sistem pembayaran dalam suatu perekonomian yaitu, untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Dengan lancarnya sistem pembayaran, penyelesaian berbagai transaksi ekonomi dapat lebih cepat dan aman. Untuk itu sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar dapat berjalan dengan aman dan lancar serta akan memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian.

B. Saran – Saran

1. Karena sistem kliring manual tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, diharapkan adanya koordinasi yang baik antar bank/pihak lain

pelaksana kliring dengan Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring untuk kelancaran pelaksanaan kliring.

2. Sistem kliring semiotomasi merupakan sistem kliring lokal sehingga diharapkan sistem ini dapat memberikan positif terhadap perekonomian daerah setempat yang dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian tersebut.
3. Dengan demikian berkembangnya perekonomian, akan semakin banyak pengguna sistem pembayaran non tunai sehingga diharapkan penyelenggara sistem pembayaran dapat mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dan dapat melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang telah ada melalui kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk mencapai hasil yang optimal. Sistem itu, penyelenggara sistem pembayaran diharapkan dapat meningkatkan keamanan untuk kelancaran sistem pembayaran.
4. Agar sistem pembayaran dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perekonomian, diharapkan adanya koordinasi yang baik antara pihak bank dan pengawas pasar keuangan dengan pengawas sistem pembayaran untuk memastikan agar masalah – masalah dan gangguan pada sistem pembayaran dapat diantisipasi dan diselesaikan seawal mungkin.

REFERENSI

Anonim, 1996, Kelembagaan Perbankan, Edisi Kedua, PT Gramedia pustaka umum, Jakarta.

Kasmir, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsi Ibnu, 1994 , Sistem dan Prosedur Kerja, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluya Harry, 1993, Ekonomi Moneter Uang dan Perbankan, Rineka Cipta , Jakarta.

Warjiwo Perry, 2004, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Pusat Pendidikan dan Study Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta.

Bank Indonesia Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Agustus 2005 , Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Bank Indonesia Samarinda, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan kliring Nasional (SKNBI) tetap akan mengacu kepada ketentuan yang ada, maka proses kegiatan kliring Nasional dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang ada hal ini akan berdampak dalam upaya memperlancar sistem pembayaran di wilayah kliring Samarinda, sistem kegiatan Kliring Nasional Bank Indonesia, sehingga hipotesis yang penulis kemukakan dapat diterima.

Sistem kliring manual adalah merupakan sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan rekapitulasi perhitungan bilyet saldo kliring serta pemilahan dan pertukaran warkat kliring dilakukan secara manual. Sistem ini pada umumnya dilakukan oleh Bank/pihak lain yang ditunjukan oleh Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring yang berada di kota kecil atau wilayah yang jauh dari kantor Bank Indonesia.

2. Sistem Kliring Semiotomasi adalah sistem penyelenggara kliring yang dalam pelaksanaannya penghitungan dan pembuatan rekapitulasi penghitungan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan dan pertukaran warkat dilakukan secara manual. Sistem ini

LAMPIRAN

Lampiran I. Perkembangan Triwulan Indikator Ekonomi Regional Propinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	2004			
		Q I	Q II	Q III	Q IV
Makro					
1	Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) (%)	6.53	7.42	6.45	6.55
2	Laju Inflasi Tahun Berjalan (y-t-d) (%)	0.60	2.82	3.90	6.55
3	Laju Inflasi Triwulan (q-t-q) (%)	0.60	2.21	1.04	2.55
4	Inflasi Bahan Makanan (q-t-q) (%)	-1.13	3.49	-2.23	4.67
5	Inflasi Makanan jadi (q-t-q) (%)	0.17	1.88	1.93	2.74
6	Inflasi Perumahan (q-t-q) (%)	1.35	1.29	1.23	2.17
7	Inflasi Sandang (q-t-q) (%)	0.83	0.26	1.11	2.30
8	Inflasi Kesehatan (q-t-q) (%)	11.68	0.46	1.08	1.99
9	Inflasi Pendidikan (q-t-q) (%)	0.57	0.53	15.61	1.10
10	Inflasi Transport (q-t-q) (%)	0.12	3.83	0.28	-0.01
11	Pertumbuhan PDRB (y-o-y) (%)	3.74	3.55	3.02	3.28
12	Pertumbuhan PDRB (q-t-q) (%)	-2.40	1.70	1.59	2.27
13	Eksport (USD Juta)	739	609	871	564
14	Import (USD Juta)	115	137	180	96
Bank Umum					
1	Giro (Rp Juta)	3,375,125	3,644,469	3,677,978	4,412,425
2	Deposito (Rp Juta)	4,875,658	4,756,436	4,394,737	4,364,410
3	Tabungan (Rp Juta)	6,959,776	7,397,339	7,820,920	8,843,464
4	DPK (Rp Juta)	15,210,559	15,798,244	15,893,635	17,620,299
5	Kredit (Rp Juta) Lokasi Proyek	9,620,632	11,572,090	12,546,486	13,664,628
6	Kredit (Rp Juta) Lokasi Kantor Bank	6,012,828	7,030,484	7,729,882	8,599,842
7	NPL (%)	2.33	2.49	2.83	1.71
8	LDR (LBU)	39.53	44.50	48.64	48.21
9	LDR (Lokasi Proyek)	63.25	73.25	78.94	77.55
10	Aktiva (Rp Juta)	18,231,271	19,095,648	19,480,611	22,716,223
BPR					
1	Aktiva (Rp Juta)	34,271	40,472	42,167	49,615
2	Deposito (Rp Juta)	16,747	19,746	20,447	21,644
3	Tabungan (Rp Juta)	10,695	11,925	12,659	14,529
4	DPK (Rp Juta)	27,442	31,671	33,106	36,173
5	Kredit Umum (Rp Juta)	26,332	29,646	30,787	33,622
6	NPL (%)	3.35	4.72	4.19	4.37
7	LDR (%)	95.92	93.61	92.99	92.95
Sistem Pembayaran					
1	Inflow (Rp Miliar)	1,725	1,448	1,563	1,883
2	Outflow (Rp Miliar)	1,846	2,141	2,315	3,146
3	PTTB (IDR Miliar)	276	290	266	245
4	Nilai Transaksi BI-RTGS (Rp Miliar)	17,848	22,884	24,148	26,912
5	Volume Transaksi RTGS (Lembar)	21,679	23,689	26,931	26,125
6	Nominal Kliring (Rp Miliar)	4,453	4,188	4,768	4,567
7	Volume Kliring (Ribu Miliar)	263	262	281	186

Sumber : Bank Indonesia Samarinda dan Bank Indonesia Balikpapan

Lampiran I. Perkembangan Triwulan Indikator Ekonomi Regional Propinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	2005			
		Q I	Q II	Q III	Q IV
Makro					
1	Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) (%)	9.69	9.21	9.36	16.94
2	Laju Inflasi Tahun Berjalan (y-t-d) (%)	3.56	5.39	6.90	16.94
3	Laju Inflasi Triwulan (q-t-q) (%)	3.56	1.77	1.44	9.39
4	Inflasi Bahan Makanan (q-t-q) (%)	1.82	1.09	0.26	11.21
5	Inflasi Makanan jadi (q-t-q) (%)	4.82	5.72	3.61	4.98
6	Inflasi Perumahan (q-t-q) (%)	2.60	1.09	1.15	7.59
7	Inflasi Sandang (q-t-q) (%)	1.87	0.84	2.03	2.33
8	Inflasi Kesehatan (q-t-q) (%)	0.41	0.47	0.08	2.78
9	Inflasi Pendidikan (q-t-q) (%)	0.21	0.11	4.17	0.30
10	Inflasi Transport (q-t-q) (%)	9.86	0.51	0.25	23.08
11	Pertumbuhan PDRB (y-o-y) (%)	5.18	3.65	2.08	-0.17
12	Pertumbuhan PDRB (q-t-q) (%)	0.87	-2.12	1.23	-1.12
13	Eksport (USD Juta)	645	788	1,106	671
14	Import (USD Juta)	100	140	265	175
Bank Umum					
1	Giro (Rp Juta)	3,783,647	5,019,268	4,967,823	6,357,027
2	Deposito (Rp Juta)	4,853,889	5,698,086	6,708,604	8,462,294
3	Tabungan (Rp Juta)	8,333,476	8,355,589	8,423,121	8,690,155
4	DPK (Rp Juta)	16,971,012	19,072,943	20,099,548	23,509,475
5	Kredit (Rp Juta) Lokasi Proyek	14,353,138	15,527,983	17,186,776	16,710,592
6	Kredit (Rp Juta) Lokasi Kantor Bank	9,093,303	10,006,532	10,590,333	10,978,375
7	NPL (%)	1.77	2.69	3.65	2.86
8	LDR (LBU)	53.58	52.46	52.69	46.70
9	LDR (Lokasi Proyek)	84.57	81.41	85.51	71.08
10	Aktiva (Rp Juta)	21,204,392	24,485,349	26,155,023	32,004,834
BPR					
1	Aktiva (Rp Juta)	50,736	52,272	55,668	65,800
2	Deposito (Rp Juta)	23,246	23,434	24,717	25,430
3	Tabungan (Rp Juta)	14,988	15,093	14,770	19,638
4	DPK (Rp Juta)	38,234	38,527	39,487	45,068
5	Kredit Umum (Rp Juta)	37,664	41,469	44,291	51,339
6	NPL (%)	4.33	3.67	3.09	3.70
7	LDR (%)	98.51	107.64	12.17	113.91
Sistem Pembayaran					
1	Inflow (Rp Miliar)	1,846	1,490	1,769	2,151
2	Outflow (Rp Miliar)	1,875	2,264	2,802	3,484
3	PTTB (IDR Miliar)	289	369	180	184
4	Nilai Transaksi BI-RTGS (Rp Miliar)	20,875	21,065	27,382	34,313
5	Volume Transaksi RTGS (Lembar)	24,047	24,588	29,665	28,650
6	Nominal Kliring (Rp Miliar)	4,887	5,206	5,297	5,204
7	Volume Kliring (Ribu Miliar)	287	300	309	301

Sumber : Bank Indonesia Samarinda dan Bank Indonesia Balikpapan

Lampiran I. Perkembangan Triwulan Indikator Ekonomi Regional Propinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	2006			
		Q I	Q II	Q III	Q IV
Makro					
1	Laju Inflasi Tahunan (y-o-y) (%)	15.11	15.25	15.06	6.04
2	Laju Inflasi Tahun Berjalan (y-t-d) (%)	1.94	3.87	5.18	6.04
3	Laju Inflasi Triwulan (q-t-q) (%)	4.43	1.89	1.27	0.82
4	Inflasi Bahan Makanan (q-t-q) (%)	1.56	1.63	0.37	0.87
5	Inflasi Makanan jadi (q-t-q) (%)	1.29	0.90	2.12	1.46
6	Inflasi Perumahan (q-t-q) (%)	1.25	4.35	1.48	0.56
7	Inflasi Sandang (q-t-q) (%)	0.77	2.77	1.62	2.01
8	Inflasi Kesehatan (q-t-q) (%)	0.53	1.64	0.55	0.56
9	Inflasi Pendidikan (q-t-q) (%)	0.26	0.63	4.47	0.54
10	Inflasi Transport (q-t-q) (%)	0.48	0.16	0.48	0.07
11	Pertumbuhan PDRB (y-o-y) (%)	0.01	4.52	3.65	6.07
12	Pertumbuhan PDRB (q-t-q) (%)	1.05	2.29	1.05	8.05
13	Eksport (USD Juta)	899	417	1,354	896.36
14	Import (USD Juta)	151	107	242	359.23
Perbankan					
Bank Umum					
1	Giro (Rp Juta)	5,023,666	7,067,858	7,514,827	9,522,268
2	Deposito (Rp Juta)	9,357,127	10,410,769	10,792,529	10,980,070
3	Tabungan (Rp Juta)	8,141,285	8,397,750	8,643,686	10,093,869
4	DPK (Rp Juta)	22,522,078	25,876,377	26,951,042	30,596,207
5	Kredit (Rp Juta) Lokasi Proyek	16,187,066	16,116,005	17,462,233	19,612,971
6	Kredit (Rp Juta) Lokasi Kantor Bank	11,080,290	11,536,996	11,963,954	12,457,624
7	Kredit Modal Kerja (Rp Juta)	4,781,549	5,178,183	5,396,060	5,560,336
8	Kredit Investasi (Rp Juta)	2,431,091	2,599,766	2,679,847	2,872,112
9	Kredit Konsumsi (Rp Juta)	3,867,650	3,759,047	3,888,047	4,025,176
10	NPL (%)	6.03	6.08	6.67	3.29
11	LDR (LBU)	49.20	44.59	44.39	40.72
12	LDR (Lokasi Proyek)	71.87	62.28	64.79	64.10
13	Aktiva (Rp Juta)	28,917,718	32,826,665	42,098,577	42,098,577
Sistem Pembayaran					
1	Inflow (Rp Miliar)	2,084	1,296	1,113	1,135
2	Outflow (Rp Miliar)	2,082	2,177	2,055	3,137
3	PTTB (IDR Miliar)	166	142	174	155
4	Nilai Transaksi BI-RTGS (Rp Miliar)	23,033	26,795	32,159	34,329
5	Volume Transaksi RTGS (Lembar)	26,859	29,524	32,912	33,730
6	Nominal Kliring (Rp Miliar)	4,734	4,790	4,522	3,547
7	Volume Kliring (Ribu Miliar)	298	303	269	181

Sumber : Bank Indonesia Samarinda dan Bank Indonesia Balikpapan

Perkembangan Triwulanan Indikator Ekonomi Regional Kalimantan Timur

No.	INDIKATOR	2004				2005				2006			
		Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV	Q I	Q II	Q III	Q IV
1	Sistem Pembayaran												
2	Inflow (Rp miliar)	1,725	1,448	1,563	1,883	1,846	1,490	1,769	2,151	2,084	1,296	1,113	1,135
3	Outflow (Rp miliar)	1,846	2,141	2,315	3,146	1,875	2,264	2,802	3,484	2,082	2,177	2,055	3,317
4	PTTB (DR miliar)	276	290	266	245	289	369	180	184	166	142	174	155
5	Nilai Transaksi BI-RTGS (Rp Miliar)	17,848	22,884	24,148	26,912	20,875	21,055	27,382	34,313	23,033	26,795	32,159	34,329
6	Volume Transaksi RTGS (lembar)	21,679	23,689	26,931	26,125	24,047	24,588	29,665	28,650	26,859	29,524	32,912	33,730
7	Nominal Kliring (Rp miliar)	4,453	4,188	4,768	4,567	4,887	5,206	5,297	5,204	4,734	4,790	4,522	3,547
	Volume Kliring (ribu lembar)	263	262	281	186	287	300	309	301	298	303	269	181

Sumber: Bank Indonesia Samarinda dan Bank Indonesia Balikpapan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 2547/D/T/2005 DAN 2548/D/T/2005
Kampus : Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Telp. 743459 - 7070289 Samarinda

Hal : Permohonan Pengajuan Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing

Kepada Yth. Bapak Ketua Jurusan
STIE Muhammadiyah
Di Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N A M A : ESTI BATNAWATI
NIM & NPM : 03110025 / 03.11.311.401100.00186
JURUSAN / PS : MANAJEMEN

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan yang telah disetujui oleh Bapak Ketua Jurusan sebagai berikut:

JUDUL: "Tinjauan Terhadap Prosedur Pelaksanaan
Kurangnya Nasional Dalam Mempelancar Sistem
Pembayaran pada Bank Indonesia di Samarinda"

Dengan judul tersebut di atas, mohon kiranya Bapak dapat menetapkan Dosen Pembimbing I dan II, untuk dapat membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.

Atas perkenan Bapak dalam hal ini saya ucapkan terima kasih.



Ketua Jurusan,
MISRANSYAH, SE
KAM. 568 975

Samarinda, 27. Februari 2007

Pemohon,

NIM. 03110025



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH S A M A R I N D A

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 2547/D/T/2005 DAN 2548/D/T/2005
Kampus : Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Telp. 743459 - 7070289 Samarinda

Samarinda,

Nomor : 30 / IL.3.AU/D/2006
Lampiran : -
Hal. : Kesediaan Membimbing Skripsi

Kepada Yth.

Pembimbing I (Drs. H. Arifin Idris, M.Si)

Pembimbing II (H. M. Hermanto, SE, MM)

Di Samarinda

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi pembimbing dalam penyusunan Skripsi Mahasiswa.

N A M A : ESTI RATNAWATI

NIM & NPM : 03110025 / 03.11.311.401100.00186

JURUSAN / PS : MANAJEMEN

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Terhadap prosedur

Pelaksanaan Kurang Masioral Dalam Mempelancar Sistem

Pembayaran pada Bank Indonesia di Samarinda

Apabila Bapak / Ibu bersedia, kami memohon kesediaannya untuk menandatangani persetujuan ini .

Atas kesediaan Bapak / Ibu kamu ucapkan terima kasih.

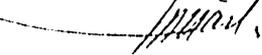
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Menyetujui :

Pembimbing I


Drs. H. Arifin Idris, M.Si

Pembimbing II


H. M. Hermanto, SE, MM



Mengetahui:
Ketua Jurusan,


SRANSYAH, SE
NPM. 568 975

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 2547/D/T/2005 DAN 2549/D.T/2005
Kampus : Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Telp. 743459 - 7070289 Samarinda

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ESTI RATNAWATI
 NIM & NPM : 09110025 / 09.11.311.401100.00186
 JURUSAN / PS : MANAJEMEN
 JUDUL SKRIPSI: "Tinjauan Terhadap Prosedur Pelaksanaan Kurang Nasiona Dalam Mempelancar Sistem Pembayaran Pada Bank Indonesia di Samarinda"

No.	Tanggal	Saran-Saran Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing		Keterangan
			I	II	
1.	1/3-07	Koreksi judul	<i>[Signature]</i>	1/3-07	lihat catatan pada lembar pengantar
2.	2/3-07	Koreksi judul	<i>[Signature]</i>		
3.	10-4/07	Konsultasi Bab I & II			perbaiki 75 di koreksi
4.	25/5-07	Koreksi Bab III & IV			
5.	7/6-07	Koreksi Bab V & VI			
6.	15/06-07	Koreksi BAB I & II	<i>[Signature]</i>		perbaiki kebetulan
7.	29/06-07	Koreksi Bab III & IV	<i>[Signature]</i>		lihat detail
8.	27/07-07	Koreksi Bab V & VI	<i>[Signature]</i>		kembali pada hipotesis

Samarinda, 27 FEBRUARY 2007



Ketua Jurusan,

[Signature]
RANSYAH, SE.

NPM. 568 975



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH SAMARINDA

SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS RI No. 2547/D/T/2005 DAN 2548/D/T/2005
Kampus : Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Telp. 743459 - 7070289 Samarinda

Samarinda,

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Samarinda (STIEM) Samarinda.

NAMA : Esti Ratnawati
NIM & NPM : 03110025
JURUSAN : MANAJEMEN
JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Terhadap Prosedur Pelaksanaan KUPING Nasional Dalam Mempelancar Sistem Pembiayaan pada Bank Indonesia di Samarinda"

Menyatakan bahwa saya benar – benar telah melaksanakan penelitian pada sebuah perusahaan : _____

WAKTU PELAKSANAAN PENELITIAN

No.	HARI / TANGGAL PENELITIAN	KETERANGAN
1.	Senin 05 Maret 2007	Mengambil Data, Membaca
2.		di perpustakaan BI
3.		
4.		

Guna mendapatkan data untuk dipergunakan dalam penulisan Skripsi yang sesuai dengan judul di atas, terima kasih.

Pimpinan Instansi / Perusahaan,



Mahasiswa yang meneliti,

Esti Ratnawati

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



MISRANSYAH, SE.
TAM : 568 975